

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH, DAN KUALITAS
DEMOKRASI TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA**

(Skripsi)

Oleh

**Filza Listiana
NPM 2111021032**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2025

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH, DAN KUALITAS
DEMOKRASI TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA**

Oleh

FILZA LISTIANA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA EKONOMI**

Pada

**Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2025

ABSTRAK

PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH, DAN KUALITAS DEMOKRASI TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA

OLEH

FILZA LISTIANA

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah dan kualitas demokrasi terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2013-2023. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Badan Pusat Statistik pada 28 provinsi di Indonesia dari tahun 2013-2023 yang di olah menggunakan regresi panel dengan menggunakan Fixed Effect Model (FEM). Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, pengeluaran pemerintah bidang perlindungan sosial, kebebasan sipil, hak politik, dan lembaga demokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan secara nasional dan, wilayah barat, wilayah tengah dan wilayah timur Indonesia. Pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan secara nasional dan di wilayah barat Indonesia, namun tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan di wilayah tengah dan timur. Sementara itu, belanja perlindungan menunjukkan hubungan yang tidak signifikan secara nasional maupun di wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia. Variabel kebebasan sipil tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan secara nasional maupun di seluruh wilayah Indonesia. Hak politik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan secara nasional maupun di seluruh wilayah Indonesia. Terakhir, lembaga demokrasi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan secara nasional dan di wilayah barat, tetapi tidak signifikan di wilayah tengah dan timur Indonesia.

Kata Kunci: Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan, Pengeluaran Pemerintah Bidang Perlindungan Sosial, Kebebasan Sipil, Hak Politik, Lembaga Demokrasi

ABSTRACT

THE EFFECT OF GOVERNMENT SPENDING, AND THE QUALITY OF DEMOCRACY ON THE POVERTY RATE IN INDONESIA

BY

FILZA LISTIANA

This study aims to identify and analyze the impact of government expenditure and the quality of democracy on poverty in Indonesia from 2013 to 2023. The research utilizes secondary data sourced from the Directorate General of Fiscal Balance and Statistics Indonesia (Badan Pusat Statistik), covering 28 provinces in Indonesia over the period 2013–2023. The data are processed using panel regression with the Fixed Effect Model (FEM). The independent variables in this study consist of government expenditure in the education sector, government expenditure in the health sector, government expenditure in the social protection sector, civil liberties, political rights, and democratic institutions. The results indicate that government expenditure in the education sector has a negative effect on poverty at the national level as well as in the western, central, and eastern regions of Indonesia. Government expenditure in the health sector has a negative effect on poverty at the national level and in the western region of Indonesia, but shows no significant effect in the central and eastern regions. Meanwhile, social protection expenditure exhibits no significant relationship with poverty at either the national level or in the western, central, and eastern regions of Indonesia. The civil liberties variable does not have a significant effect on poverty, either at the national level or across all regions of Indonesia. Political rights have a negative and significant effect on poverty at the national level and across all regions. Lastly, democratic institutions have a significant effect on poverty at the national level and in the western region, but the effect is not significant in the central and eastern regions of Indonesia.

Keywords: *Poverty, Government Spending on Education, Government Spending on Health, Government Spending on Social Protection, Civil Liberties, Political Rights, Democratic Institutions*

Judul Skripsi : Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, dan Kualitas Demokrasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia

Nama Mahasiswa : Filza Listiana
Nomor Pokok Mahasiswa : 2111021032
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

MENYETUJUI

Komisi Pembimbing I

Komisi Pembimbing II

Prof. Dr. Ambya, S.E., M.Si.
NIP. 195907191987031002

Prayudha Ananta, S.E., M.Si.
NIP. 198809162014041001

MENGETAHUI

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Dr. Arivina Ratih Y.T., S.E., M.M.
NIP. 198007052006042002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Ambya, S.E., M.Si.

Ambya

Penguji I : Dr. Heru Wahyudi, S.E., M.Si.

Heru Wahyudi

Penguji II : Prayudha Ananta, S.E., M.Si.

Prayudha Ananta



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 19660621 199003 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 04 Agustus 2025

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Filza Listiana

NPM : 2111021032

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, dan Kualitas Demokrasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia" telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan bukan merupakan penjiplakan hasil karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman dan sanksi yang berlaku.

Bandar Lampung, 13 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan,



Filza Listiana

RIWAYAT HIDUP



Filza Listiana lahir pada 25 Oktober 2002 di Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Penulis lahir sebagai anak kedua dari 2 bersaudara, dari pasangan Bapak Mathori dan Ibu Sri Sugiati. Penulis memulai Pendidikan di TK PGRI Tanjung Harapan pada tahun 2007 dan selesai di tahun 2008. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Dasar di SDN 1 Negeri Katon dan tamat pada tahun

2014. Kemudian melanjutkan Pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Sekampung dan tamat pada tahun 2017. Kemudian melanjutkan lagi ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Sekampung dan tamat pada tahun 2020.

Pada tahun 2021 penulis berkesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi dan diterima pada salah satu perguruan tinggi negeri yaitu Universitas Lampung, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Selama menjadi mahasiswa, penulis mengikuti kegiatan organisasi UKM-F Rois FEB pada tahun 2022 - 2023. Selanjutnya pada tahun 2024 penulis melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Lebung Lawe, Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Way kanan.

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”

(QS. Ar-Ra’d: 11)

“Aku menyerahkan segala urusanku kepada Allah”

(QS. Ghafir: 44)

“Hatiku tenang mengetahui apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang di takdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu”

(Umar bin Khattab)

“I'm not someone who's good at managing my own thoughts. However, I believe that everyone has a unique way of bringing meaning into others' lives including me, through sincere actions and good intentions. That's why I will do my best to make the world I touch a little more beautiful, so that one day, I won't feel ashamed or regretful in front of the people who have trusted me”

PERSEMBAHAN



Alhamdulillahirabbil'alamin. Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan karunia, rahmat dan hidayahNya serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan ketulusan hati, aku persembahkan tulisan ini kepada:

Orang Tuaku tercinta

Terima kasih atas segala hal yang telah kalian berikan dalam hidupku. Untuk setiap pengorbanan, kesabaran, nasihat, dan doa yang kalian panjatkan, aku sungguh bersyukur. Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian dengan limpahan kebaikan yang berlipat. Semoga keluarga kita selalu diberkahi, dipenuhi kebahagiaan, dan kelak dapat berkumpul kembali di Surga-Nya.

Keluarga Besar,

Yang selalu mendampingi penulis dengan doa dan semangat

Sahabat-Sahabatku,

Yang telah kebersamai dan memberikan kesan indah dalam perjalanan perkuliahan ini

Para dosen dan civitas akademika,

Yang telah membekali dengan pengetahuan, semangat, dan inspirasi untuk terus melangkah menuju masa depan

**Almamater tercinta,
dan orang-orang baik yang tidak dapat disebutkan satu per satu.**

SANWACANA

Bismillahirrohmaanirrohiim,

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penullis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, dan Kualitas Demokrasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya arahan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh ketulusan dan rasa hormat, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Arivina Ratih YT, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Zulfa Emalia, S.E., M.Sc., selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Bapak Prof. Dr. Ambya, S.E. M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, serta memberikan ilmu dan sarannya kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
5. Bapak Prayudha Ananta, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang juga telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, serta memberikan ilmu, saran, dan masukan kepada penulis selama penyusunan skripsi.

6. Bapak Dr. Heru Wahyudi, S.E., M.Si., selaku Dosen Penguji I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan saran, masukan, dan nasihatnya kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini
7. Bapak Arif Darmawan, S.E., M.A., selaku Dosen Pembahas saat Semnar Proposal yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan saran dan masukkannya yang membangun untuk memperbaiki penulisan skripsi.
8. Ibu Dr. Neli Aida, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasihat dan bimbingan kepada penulis selama proses perkuliahan.
9. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan, motivasi, dan inspirasi selama masa perkuliahan, serta para staff dan pegawai di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah banyak membantu kelancaran proses skripsi ini.
10. Teristimewa, kepada kedua orang tuaku tercinta, Ayah Mathori dan Ibu Sri Sugiati, yang telah menjadi pilar kekuatan dalam hidupku. Terima kasih atas setiap doa, cinta, dukungan, pengorbanan, dan kasih sayang yang tak ternilai sejak awal hingga saat ini. Semoga segala kebaikan yang telah Ayah dan Ibu berikan dibalas dengan limpahan rahmat, keberkahan, dan ridha dari Allah SWT.
11. Kepada kakakku Vera, yang selalu menjadi tempat berbagi cerita, memberi semangat, serta mendukung setiap langkahku. Terima kasih atas perhatian, doa, dan motivasi yang tak pernah putus. Juga untuk keponakanku yang sudah seperti adik sendiri Aqila, terima kasih telah menjadi penyemangat dalam hari-hariku. Semoga Allah SWT selalu menjaga dan membalas kebaikan kalian dengan kebahagiaan yang berlimpah.
12. Untuk sahabat-sahabat terbaikku Annisa, Devita, Nurfa, dan Gita terima kasih atas kebersamaan yang penuh tawa, semangat, dan dukungan yang tak ternilai selama perjalanan ini. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, dan sumber kekuatan dalam proses panjang menyelesaikan skripsi ini. Kehadiran kalian adalah anugerah yang tak tergantikan. Semoga persahabatan kita selalu diberkahi dan terjaga hingga akhir waktu.

13. Kepada teman-teman seperjuangan dalam bimbingan Septi, Wina, Ade, dan Ria, terima kasih atas kebersamaan, semangat, dan saling dukung selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi tempat bertukar pikiran, berbagi keluh kesah, dan saling menyemangati di tengah segala tantangan. Semoga segala usaha dan perjuangan kita membuahkan hasil terbaik dan menjadi langkah awal menuju masa depan yang gemilang.
14. Kepada teman-teman KKN Desa Lebung Lawe, Ayu, Kartika, Queen, Naufal, dan Pandu, terima kasih atas kebersamaan, kerja sama, dan kenangan indah yang kita lalui bersama. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup yang penuh warna, tawa, dan pelajaran berharga. Semoga pengalaman dan persahabatan kita selama KKN menjadi bekal yang berarti untuk masa depan, dan semoga kita semua sukses di jalan masing-masing.
15. Kepada orang-orang baik yang pernah kutemui selama masa perkuliahan.
16. Almamater kebanggaan, Universitas Lampung.
17. Teruntuk diriku sendiri, terima kasih telah bertahan dan berjuang hingga sejauh ini. Terima kasih karena telah kuat menghadapi segala ujian dan menerima setiap ketetapan Nya dengan ikhlas, semata-mata mengharap ridha Nya. Perjalanan ini belum selesai masih panjang jalan yang harus ditempuh. Semoga di langkah-langkah selanjutnya, hanya kebaikan yang menanti. *See you when I see you in the next level.*

Sebagai penutup, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan belum sempurna. Namun, penulis berharap karya ini dapat memberikan manfaat. Segala doa, dukungan, serta bimbingan yang telah diberikan kepada penulis, semoga dibalas dengan limpahan kebaikan dan rahmat dari Allah SWT. Aamiin ya Rabbal 'Alamin.

Bandar Lampung, 21 Juli 2025

Penulis

Filza Listiana

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	15
1.4 Manfaat Penelitian.....	16
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1 Landasan Teori.....	17
2.1.1 Kemiskinan.....	17
2.1.2 Peran Pemerintah.....	22
2.1.3 Pengeluaran Pemerintah.....	24
2.1.4 Kualitas Demokrasi	29
2.2 Tinjauan Empiris	36
2.3 Kerangka Pemikiran.....	39
2.4 Hipotesis Penelitian.....	40
BAB 3 METODE PENELITIAN	42
3.1 Jenis dan Sumber Data	42
3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian.....	43
3.3 Definisi Operasional.....	44
3.3.1 Variabel Terikat (dependent variabel) (Y)	44
3.3.2 Variabel Bebas (independent variabel) (X).....	44
3.4 Teknik Pengumpulan Data	47

3.5	Metode Analisis Data	47
3.6	Prosedur Analisis Data	49
3.6.1	Regresi Data Panel	49
3.6.2	Pemilihan Model Regresi Estimasi Data Panel	51
3.6.3	Uji Asumsi Klasik	53
3.6.4	Pengujian Hipotesis	54
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN		58
4.1	Analisis Statistik Deskriptif	58
4.2	Uji Pemilihan Model Regresi Data Panel	60
4.2.1	Uji Chow	60
4.2.2	Uji Hausman	60
4.2.3	Uji Lagrange Multiplier (LM-Test)	61
4.3	Uji Asumsi Klasik	62
4.3.1	Uji Normalitas	62
4.3.2	Uji Multikolinieritas	62
4.3.3	Uji Heterokedastisitas dan Uji Autokorelasi	62
4.4	Hasil Estimasi Regresi Data Panel	63
4.4.1	Hasil Estimasi Regresi Data Panel Pada 28 Provinsi di Indonesia	63
4.4.2	Hasil Estimasi Regresi Data Panel Pada Provinsi – Provinsi di Wilayah Barat Indonesia	65
4.4.3	Hasil Estimasi Regresi Data Panel Pada Provinsi – Provinsi di Wilayah Tengah Indonesia	66
4.4.4	Hasil Estimasi Regresi Data Panel Pada Provinsi – Provinsi di Wilayah Timur Indonesia	67
4.5	Uji Hipotesis Statistik	68
4.5.1	Uji t-Statistik	68
4.5.2	Uji F-Statistik	71
4.5.3	Koefisien Determinasi	71
4.6	Pembahasan Penelitian	72

4.6.1	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan.....	72
4.6.2	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan Terhadap Tingkat Kemiskinan.....	76
4.6.3	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Perlindungan Sosial Terhadap Tingkat Kemiskinan	82
4.6.4	Pengaruh Kebebasan Sipil Terhadap Tingkat Kemiskinan.....	85
4.6.5	Pengaruh Hak-Hak Politik Terhadap Tingkat Kemiskinan.....	89
4.6.6	Pengaruh Lembaga Demokrasi Terhadap Tingkat Kemiskinan	92
4.6.7	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pelindungan Sosial, Kebebasan Sipil, Hak – Hak Politik, dan Lembaga Demokrasi Secara Bersama – Sama Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia	96
4.7	<i>Individual Effect</i> Hasil Regresi Data Panel 28 Provinsi di Indonesia Tahun 2011-2023.....	97
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN		101
5.1	Kesimpulan.....	101
5.2	Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA.....		106
LAMPIRAN.....		113

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. Penelitian Terdahulu	36
Tabel 2. Deskripsi Data.....	42
Tabel 3. Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	58
Tabel 4. Hasil Estimasi Regresi Data Panel.....	63
Tabel 5. Hasil Uji t-Statistik 28 Provinsi, dan Wilayah Barat Indonesia.....	69
Tabel 6. Hasil Uji t-Statistik Wilayah Tengah, dan Wilayah Timur Indonesia	69
Tabel 7. Hasil Uji F-Statistik	71
Tabel 8. Hasil perhitungan <i>Individual Effect</i> Tahun 2011-2023	98

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. Rata – Rata Tingkat Kemiskinan di 3 Wilayah Indonesia Tahun 2011-2023	5
Gambar 2. Kerangka Pemikiran.....	40
Gambar 3. Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2020/2021 sampai dengan 2023/2024.....	73
Gambar 4. Jumlah Guru Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2021/2022 sampai dengan 2023/2024.....	74
Gambar 5. Jumlah Puskesmas dan Rumah Sakit di Indonesia Tahun 2019 Sampai Dengan 2023.	78
Gambar 6. Jumlah Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Kesehatan di Indonesia Tahun 2019 Sampai Dengan 2023	79
Gambar 7. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2013-2023	83
Gambar 8. Perkembangan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun 2016-2023	93

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia (Yani, 2024). Fenomena ini tidak hanya mencakup kekurangan pendapatan, tetapi juga berhubungan dengan keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan yang layak, dan pekerjaan yang memadai. Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan secara umum sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan terjadi ketika individu mengalami keterbelakangan dan minimnya terhadap akses untuk mendapat kehidupan yang lebih layak, baik itu dalam dimensi kesehatan, kualitas hidup layak, pendidikan, akses terhadap ekonomi dan akses dalam berdemokrasi.

Kemiskinan di Indonesia masih menjadi tantangan yang signifikan, yang berkaitan erat dengan upaya negara untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) khususnya tujuan 1, yang bertujuan untuk memberantas kemiskinan dalam segala bentuknya. Dalam Novrizaldi (2024) Menteri Keuangan Sri Mulyani menyoroti bahwa salah satu faktor yang menyebabkan kemiskinan tetap ada adalah pertumbuhan populasi, meskipun persentase penduduk miskin telah mengalami penurunan dalam beberapa dekade terakhir, jumlah absolut penduduk miskin masih tetap tinggi karena bertambahnya jumlah penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan kemiskinan bukan hanya soal keberhasilan menurunkan persentase, tetapi juga soal bagaimana mengelola pertumbuhan penduduk agar tidak memperburuk situasi.

Selain itu dalam (Azzahra, 2024), Menko PMK Muhadjir Effendy menyoroti kesulitan dalam menangani kemiskinan ekstrem di Indonesia. Beliau mengibaratkan upaya ini seperti membersihkan kerak nasi yang memerlukan usaha ekstra keras. Dalam

pandangannya, semakin kecil angka kemiskinan, semakin sulit pula mengurangi jumlah penduduk miskin yang tersisa karena mereka biasanya berada dalam kondisi paling rentan, baik secara ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu, pemerintah memerlukan modal dan upaya yang lebih besar untuk menjangkau kelompok ini, termasuk memperluas cakupan intervensi. Pemerintah juga telah menargetkan agar kemiskinan ekstrem dihapuskan sepenuhnya pada tahun 2030, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang menempatkan pengentasan kemiskinan sebagai prioritas pertama.

Sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). SDG No. 1, yaitu “Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di mana pun”, menargetkan bahwa pada tahun 2030, tidak ada lagi individu yang hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem. Untuk mencapai hal ini, berbagai program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) telah diterapkan. Namun, efektivitas program-program ini masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal akurasi data dan penargetan penerima bantuan agar bantuan sosial dapat benar-benar menjangkau mereka yang membutuhkan (Piri, 2024). Masalah kemiskinan juga berkaitan dengan SDG No. 2, yaitu “Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan meningkatkan gizi”, kemiskinan memiliki dampak langsung terhadap tingkat kelaparan dan malnutrisi, terutama di kalangan anak-anak dan ibu hamil. Banyak keluarga miskin di Indonesia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan gizi dasar karena keterbatasan pendapatan. Hal ini mengakibatkan tingginya angka stunting dan gizi buruk di Indonesia, yang berdampak pada kemampuan anak-anak untuk berkembang secara optimal (Novrizaldi, 2023).

Kemiskinan juga erat kaitannya dengan SDG No. 3, yaitu “Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan untuk semua pada segala usia”. Kesehatan masyarakat miskin sering kali terabaikan karena kurangnya akses terhadap layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas. Biaya kesehatan yang tinggi, terutama di daerah-daerah terpencil, menjadi penghalang utama bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan. Dalam beberapa kasus, penyakit yang

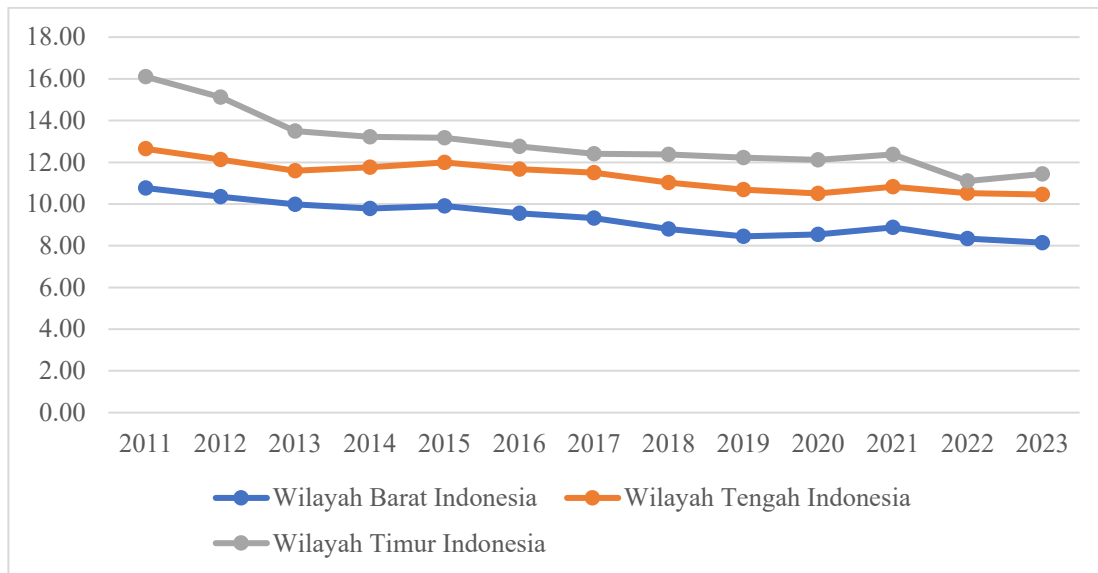
sebenarnya bisa dicegah menjadi masalah serius karena keterbatasan akses ini (Zulin, 2024). Program seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan telah memberikan manfaat besar, tetapi masih banyak tantangan yang harus diatasi, seperti kualitas layanan di fasilitas kesehatan dan ketimpangan akses antara daerah perkotaan dan pedesaan. Selanjutnya kemiskinan juga berkaitan dengan SDG No. 4, yaitu “Menjamin pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas serta mendukung kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua” kemiskinan menjadi penghalang utama bagi akses pendidikan. Banyak anak dari keluarga miskin terpaksa putus sekolah karena harus membantu keluarga mereka mencari nafkah. Meskipun pemerintah telah menyediakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk membantu biaya pendidikan, tantangan seperti kurangnya infrastruktur sekolah di daerah terpencil, rendahnya kualitas pengajaran, dan keterbatasan akses terhadap teknologi pendidikan masih menjadi hambatan. Pendidikan yang berkualitas adalah kunci untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi, sehingga investasi dalam sektor ini menjadi sangat penting (Adhana, 2024) .

Permasalahan terkait kemiskinan sangat kompleks dan tidak hanya berkisar pada kekurangan materi atau pendapatan semata. Salah satu masalah utama adalah tidak meratanya distribusi kekayaan yang sering terjadi di banyak negara (Wibowo, 2016). Ketimpangan ini tercermin dalam perbedaan akses terhadap sumber daya yang dapat meningkatkan kesejahteraan, seperti tanah, modal, atau teknologi. Dalam banyak kasus, kebijakan ekonomi yang tidak inklusif atau sistem yang tidak adil dapat memperburuk ketidaksetaraan ini. Selain itu, kemiskinan juga berhubungan erat dengan masalah sosial lainnya, seperti pendidikan yang rendah, tingkat kesehatan yang buruk, serta tingginya angka pengangguran. Masyarakat miskin sering kali terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang sulit diputuskan, di mana ketidakmampuan untuk mengakses pendidikan yang layak membatasi peluang untuk memperoleh pekerjaan yang baik, dan akhirnya mengarah pada kondisi ekonomi yang lebih buruk (Rabbani, 2023).

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa, meskipun angka kemiskinan di Indonesia telah mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, kemiskinan tetap menjadi masalah yang menghambat pembangunan. Sebagian besar masyarakat miskin di Indonesia tinggal di daerah pedesaan, yang memiliki akses terbatas terhadap infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Sementara itu, ketimpangan antara daerah urban dan rural masih sangat mencolok, di mana kota-kota besar seperti Surabaya, dan Bandung memiliki tingkat kemiskinan yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan wilayah timur Indonesia seperti Maluku dan Nusa Tenggara Timur, yang tingkat kemiskinannya masih tergolong tinggi.

Berdasarkan data rata-rata tingkat kemiskinan dari tahun 2011 hingga 2023, terlihat bahwa masih terdapat ketimpangan tingkat kemiskinan antar provinsi di Indonesia. Rata-rata nasional tingkat kemiskinan selama periode tersebut adalah 10,35 persen. Provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi adalah Nusa Tenggara Timur, dengan rata-rata sebesar 20,99 persen, hampir dua kali lipat dari rata-rata nasional. Disusul oleh Maluku (18,77 persen), Gorontalo (16,81 persen), Bengkulu (16,33 persen), dan Nusa Tenggara Barat (16,01 persen). Hal tersebut mengindikasikan bahwa wilayah-wilayah ini masih menghadapi persoalan struktural dalam pembangunan ekonomi dan sosial, seperti terbatasnya akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur dasar, serta lapangan pekerjaan yang layak.

Sementara itu, provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah adalah Bali, dengan rata-rata hanya 4,23 persen, jauh di bawah rata-rata nasional. Provinsi lain yang juga mencatat tingkat kemiskinan rendah antara lain Kepulauan Bangka Belitung (5,08 persen), Kalimantan Selatan (4,73 persen), dan Kalimantan Tengah (5,58 persen). Hal tersebut mengindikasikan bahwa daerah-daerah yang memiliki sektor unggulan seperti pariwisata, pertambangan, atau industri yang berkembang cenderung mampu menekan angka kemiskinan lebih efektif.



Sumber: Badan Pusat Statistik 2024, diolah

Gambar 1. Rata – Rata Tingkat Kemiskinan di 3 Wilayah Indonesia Tahun 2011-2023

Berdasarkan grafik rata-rata tingkat kemiskinan di Indonesia dari tahun 2011 hingga 2023 yang terbagi dalam tiga wilayah yaitu wilayah barat, wilayah tengah, dan wilayah timur Indonesia terlihat pola yang konsisten bahwa semakin ke arah timur, tingkat kemiskinan cenderung semakin tinggi. Wilayah timur Indonesia secara konsisten mencatatkan tingkat kemiskinan tertinggi sepanjang periode tersebut. Misalnya, pada tahun 2011, wilayah ini mencatatkan tingkat kemiskinan sebesar 16,10%, jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah tengah (12,65%) maupun wilayah barat (10,77%). Meskipun terjadi penurunan secara bertahap hingga tahun 2022, angka kemiskinan di wilayah timur tetap berada pada posisi tertinggi, yakni 11,10% di tahun 2022 dan sedikit naik menjadi 11,44% pada 2023.

Selama periode 13 tahun ini, ketiga wilayah menunjukkan fluktuasi angka kemiskinan yang relatif dinamis, mencerminkan adanya berbagai faktor ekonomi, sosial, dan kebijakan yang memengaruhi perubahan tersebut. Meskipun secara umum tren menunjukkan penurunan, terdapat beberapa tahun di mana angka kemiskinan meningkat kembali, misalnya pada tahun 2020 dan 2021, yang kemungkinan besar berkaitan dengan dampak pandemi COVID-19.

Secara umum, wilayah tengah Indonesia memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah barat, meskipun tidak setinggi wilayah timur. Sepanjang periode tersebut, perbedaan antara wilayah tengah dan barat relatif konsisten, dengan wilayah tengah mencatatkan angka kemiskinan rata-rata di kisaran 12,65% hingga 10,46%, sedangkan wilayah barat selalu berada di bawahnya, antara 10,77% hingga 8,15%.

Fakta bahwa tingkat kemiskinan cenderung meningkat dari barat ke timur menjadi gambaran nyata dari ketimpangan pembangunan antarwilayah di Indonesia. Wilayah barat, yang meliputi kawasan-kawasan seperti Jawa dan Sumatra, cenderung lebih maju dari segi infrastruktur dan ekonomi, sementara wilayah tengah dan terutama wilayah timur masih menghadapi tantangan besar dalam aspek pembangunan, akses layanan dasar, dan pemerataan kesejahteraan. Hal ini menegaskan pentingnya kebijakan pembangunan yang lebih berpihak pada daerah-daerah tertinggal, khususnya di kawasan timur Indonesia, guna mengurangi kesenjangan dan mencapai pembangunan yang lebih inklusif.

World Bank (2024), menyatakan bahwa meningkatkan pendapatan tenaga kerja dengan menciptakan lebih banyak lapangan kerja yang lebih baik dan berinvestasi di bidang pendidikan, infrastruktur, dan layanan dasar akan menjadi hal yang penting agar masyarakat yang hidup dalam kemiskinan dapat memperoleh manfaat yang lebih besar dan berkontribusi pada pertumbuhan, serta meningkatkan ketahanan mereka di tengah gejolak yang semakin meningkat. Pengeluaran pemerintah di sektor-sektor utama seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial terbukti memainkan peran penting dalam mengurangi kemiskinan (Misdawita & Sari, 2018). Dalam studi yang dilakukan oleh Fan, Hazell, and Thorat (2000) di India menunjukkan pengaruh yang positif, yaitu bahwa peningkatan pengeluaran di sektor-sektor tersebut berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan di pedesaan melalui peningkatan kesejahteraan sosial dan akses terhadap layanan publik. Selanjutnya, studi yang dilakukan oleh Hong and Ahmed (2009) juga menunjukkan bahwa belanja pemerintah pada barang publik memiliki dampak positif terhadap pengurangan kemiskinan, begitu pula penelitian yang dilakukan Liu, Li, and Zhao (2020) yang mengkaji pengeluaran di daerah

pedesaan Tiongkok. Berbagai studi tersebut secara konsisten menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah yang strategis dan berfokus pada sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan tidak hanya meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga secara langsung menurunkan tingkat kemiskinan.

Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan memainkan peran strategis dalam meningkatkan kualitas modal manusia (Mongan, 2019). Menurut Hidalgo-Hidalgo and Iturbe-Ormaetxe (2018) penelitian ia menunjukkan pengaruh yang positif, di mana pengalokasian dana yang benar dalam sektor sosial seperti pendidikan dapat meningkatkan kualitas hidup individu dan keluarganya, sehingga mengurangi kemiskinan. Hasil penelitian Craigwell, Bynoe, and Lowe (2012) juga menyatakan hasil yang positif, yaitu bahwa pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan memiliki dampak yang signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Karibia. Selanjutnya, penelitian oleh Jung and Thorbecke (2003), ia menjelaskan bahwa pengeluaran publik untuk pendidikan secara signifikan mempengaruhi modal manusia, pertumbuhan ekonomi, dan secara tidak langsung menurunkan tingkat kemiskinan di Tanzania dan Zambia. Rambeli et al. (2021) menemukan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Disisi lain terdapat penelitian di mana pengeluaran pemerintah bidang pendidikan memiliki pengaruh positif terhadap penurunan kemiskinan, seperti penelitian oleh (Rasyid & Triani, 2024), hal ini disebabkan oleh ketidaktepatan target dari pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, yang belum merata dan menyeluruh ke masyarakat miskin.

Berdasarkan data rata-rata pengeluaran pemerintah bidang pendidikan selama periode 2011 hingga 2023, terlihat bahwa sebagian besar provinsi di Indonesia masih mengalokasikan anggaran pendidikan di bawah rata-rata nasional, yaitu 0,98 persen dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Hal tersebut mencerminkan adanya disparitas dalam komitmen dan kapasitas fiskal daerah terhadap pembangunan sektor pendidikan. Jika merujuk pada standar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO), idealnya

pengeluaran untuk pendidikan berada pada kisaran 4–6 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara atau wilayah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa seluruh provinsi di Indonesia masih sangat jauh dari standar internasional yang disarankan, baik secara absolut maupun relatif.

Provinsi dengan pengeluaran pendidikan tertinggi adalah Maluku (2,52 persen), disusul oleh Nusa Tenggara Timur (2,37 persen), Gorontalo (1,51 persen), dan Maluku Utara (1,90 persen). Hal tersebut mengindikasikan bahwa provinsi-provinsi ini berusaha keras untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui alokasi anggaran yang relatif besar, kemungkinan sebagai respons terhadap kondisi pendidikan yang masih tertinggal atau akses yang terbatas. Sebaliknya, terdapat beberapa provinsi yang mencatatkan pengeluaran pendidikan paling rendah, seperti Kalimantan Timur (0,35 persen), Jawa Timur (0,39 persen), Riau (0,42 persen), dan Jawa Tengah (0,49 persen). Hal tersebut mengindikasikan bahwa pengeluaran sektor pendidikan belum menjadi prioritas utama dalam struktur belanja pemerintah daerah, atau bisa jadi karena kapasitas fiskal yang terbatas dan ketergantungan pada anggaran dari pusat.

Menariknya, beberapa provinsi dengan tingkat kemiskinan tinggi seperti Nusa Tenggara Timur dan Maluku, justru mencatatkan pengeluaran pendidikan yang sangat tinggi. Hal ini mengindikasikan adanya upaya serius dari pemerintah daerah untuk menjadikan pendidikan sebagai sarana utama pengentasan kemiskinan. Namun, pengaruh dari alokasi tersebut mungkin belum maksimal karena faktor lain seperti kualitas belanja, pemerataan akses, dan dukungan sektor lainnya.

Selain pendidikan, sektor kesehatan juga menjadi kunci penting dalam pengentasan kemiskinan. Akses terhadap layanan kesehatan yang memadai tidak hanya meningkatkan kesejahteraan individu, tetapi juga meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Craigwell et al. (2012) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan memiliki dampak yang signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Karibia. Fan et al (2000) menekankan bahwa di India, pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan sangat berperan dalam menurunkan tingkat kemiskinan di pedesaan melalui peningkatan kesejahteraan sosial dan akses terhadap layanan publik.

Dari beberapa studi empiris tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran di sektor kesehatan tidak hanya memperluas akses terhadap layanan kesehatan tetapi juga menurunkan tingkat kematian dan penyakit, yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja yang meningkat berkontribusi langsung pada penurunan angka kemiskinan, karena masyarakat yang sehat lebih mampu bekerja dengan optimal dan menghasilkan pendapatan yang stabil. Akan tetapi disisi lain juga terdapat penelitian di mana pengeluaran pemerintah bidang kesehatan memiliki pengaruh positif atau tidak signifikan terhadap penurunan kemiskinan, seperti penelitian oleh Misdawita dan Sari (2018) menunjukkan hasil yang positif serta penelitian oleh (Hidayat & Azhar (2022) menunjukkan hasil yang negatif akan tetapi tidak signifikan terhadap penurunan kemiskinan.

Berdasarkan data rata-rata pengeluaran pemerintah bidang kesehatan di 28 provinsi di Indonesia selama tahun 2011–2023, terlihat bahwa sebagian besar provinsi masih mengalokasikan anggaran di bawah rata-rata nasional, yaitu sebesar 0,36 persen dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Bahkan, tidak ada satu pun provinsi yang mampu mencapai atau mendekati angka ideal yang dianjurkan oleh World Health Organization (WHO), yaitu minimal 5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) untuk sektor kesehatan. Hal ini mencerminkan bahwa sektor kesehatan belum menjadi prioritas utama dalam pengalokasian anggaran daerah.

Beberapa provinsi yang memiliki pengeluaran tertinggi, seperti Maluku (0,79%), Maluku Utara (0,75%), dan Kalimantan Selatan (0,73%), masih belum mencapai 1 persen dari PDRB, yang berarti masih sangat jauh dari standar WHO. Sementara itu, provinsi dengan pengeluaran terendah antara lain Jawa Barat (0,08%), Sumatera Utara (0,10%), dan Banten (0,13%), menunjukkan alokasi anggaran yang sangat minim untuk sektor yang sangat penting ini.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat kesenjangan serius dalam perhatian dan komitmen daerah terhadap layanan kesehatan masyarakat. Rendahnya alokasi anggaran ini berpotensi berdampak pada kualitas layanan kesehatan, ketersediaan fasilitas, serta kemampuan pemerintah dalam merespon kebutuhan

kesehatan masyarakat secara merata dan memadai. Terutama bagi provinsi-provinsi dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, alokasi anggaran kesehatan yang rendah bisa memperburuk ketimpangan kesejahteraan dan memperlambat upaya pengentasan kemiskinan

Selain itu, perlindungan sosial merupakan elemen penting dalam strategi pengurangan kemiskinan global. Perlindungan sosial mencakup berbagai program seperti jaminan kesehatan, bantuan tunai, dan program-program kesejahteraan lainnya yang secara langsung bertujuan mengurangi kerentanan ekonomi di kalangan kelompok miskin. Popova (2023), menyatakan bahwa perlindungan sosial yang kuat, termasuk bantuan sosial dan program jaminan sosial, dapat mengurangi ketimpangan pendapatan dan memberikan jaring pengaman bagi masyarakat miskin. Fan et al., (2000), menekankan bahwa di India pengeluaran pemerintah di sektor perlindungan sosial sangat berperan dalam menurunkan tingkat kemiskinan di pedesaan. Barrientos (2011) menunjukkan bahwa program perlindungan sosial dapat secara signifikan mengurangi risiko kemiskinan. Sánchez Dávila (2023) dalam penelitiannya terhadap negara-negara Amerika Latin menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi dan belanja sosial untuk pengurangan kemiskinan. Dengan adanya sistem perlindungan sosial yang kuat, risiko kelompok rentan jatuh kembali ke dalam kemiskinan dapat diminimalkan, sehingga memajukan upaya peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh.

Akan tetapi disisi lain juga terdapat penelitian di mana pengeluaran pemerintah bidang perlindungan sosial memiliki pengaruh positif atau tidak signifikan terhadap penurunan kemiskinan, seperti penelitian oleh Sirait et al. (2022) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah bidang perlindungan sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, serta penelitian oleh Susanti dan Sartiyah (2019) hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk perlindungan sosial tidak berpengaruh dalam menurunkan kemiskinan.

Berdasarkan data rata-rata pengeluaran pemerintah bidang perlindungan sosial di 28 provinsi Indonesia selama tahun 2011–2023, terlihat bahwa sebagian besar provinsi masih mengalokasikan anggaran di bawah rata-rata nasional, yaitu sebesar 0,05 persen

dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Bahkan terdapat beberapa provinsi dengan pengeluaran yang sangat rendah, seperti Riau (0,0164%), Jawa Barat (0,0165%), dan Kalimantan Timur (0,0173%), yang menunjukkan bahwa alokasi untuk sektor perlindungan sosial masih belum menjadi prioritas utama di wilayah-wilayah tersebut. Sebaliknya, hanya beberapa provinsi yang mampu mengalokasikan anggaran di atas rata-rata nasional, seperti Maluku Utara (0,1166%), Gorontalo (0,1168%), dan Maluku (0,1065%). Provinsi-provinsi ini menunjukkan komitmen yang lebih besar terhadap perlindungan sosial, meskipun persentasenya masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan total PDRB mereka.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar daerah belum memberikan perhatian yang memadai terhadap upaya perlindungan sosial, padahal sektor ini sangat penting dalam mengurangi kerentanan sosial dan ekonomi masyarakat miskin dan rentan. Perlindungan sosial mencakup berbagai bentuk bantuan seperti jaminan sosial, bantuan langsung tunai, dan subsidi kebutuhan dasar yang dapat berdampak besar terhadap pengurangan kemiskinan dan ketimpangan. Tanpa alokasi anggaran yang cukup, program-program perlindungan sosial di daerah dikhawatirkan tidak mampu menjangkau masyarakat secara optimal, terutama dalam situasi darurat atau tekanan ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mempertimbangkan peningkatan investasi di bidang ini guna menciptakan jaring pengaman sosial yang kuat dan inklusif.

Selain itu, Sen (1982) menyatakan bahwa kemiskinan juga dipengaruhi oleh aspek politik yang tercermin pada lemahnya akses terhadap demokrasi. Ketika proses demokrasi tidak berjalan sebagai mestinya dalam lingkungan masyarakat maka kemiskinan tersebut juga akan meningkat. Demokrasi ini memiliki pengaruh yang negatif terhadap kemiskinan artinya ketika demokrasi di jalankan dengan baik akan menurunkan jumlah kemiskinan. Pernyataan tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gao & Zang (2022) menyatakan bahwa peningkatan kualitas pemerintah, peningkatan kebebasan dalam berbicara, meningkatkan pemberian hak politik dapat menurunkan jumlah kemiskinan. Hal tersebut diperjelas dengan temuan

oleh Adnan & Amri (2021) yang menjelaskan bahwa dalam jangka pendek demokrasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, namun dalam jangka panjang demokrasi berpengaruh signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Aguilar (2016) menyoroti bahwa kebebasan sipil memiliki dampak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan, terutama di negara-negara demokratis. Penelitian yang dilakukan oleh Yolanda (2019) yang menunjukkan bahwa demokrasi berpengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap kemiskinan. Artinya, jika demokrasi meningkat maka kemiskinan akan menurun. Penelitian lain yang dilakukan oleh Harber (2002) menyatakan bahwa demokrasi dapat menjadi pilihan yang lebih baik daripada otoritarianisme dalam membantu mengurangi kemiskinan. Pendapat ini berbeda dengan yang dikemukakan oleh (Sijapati, 2006) dan (Purmiyati et al., 2023), yang menyatakan bahwa demokrasi pada dasarnya tidak dapat menjadi solusi dalam mengatasi kemiskinan. Hal ini dikarenakan kemiskinan yang terjadi di negara berkembang bersumber dari masalah yang berbeda dan berasal dari kelompok yang berbeda pula.

Kebebasan sipil, hak-hak politik, dan keberadaan lembaga demokrasi yang kuat memiliki peran krusial dalam menentukan tingkat kemiskinan di suatu negara (Gao & Zang, 2022). Kebebasan sipil, yang mencakup hak berekspresi, berkumpul, dan beragama, memungkinkan masyarakat untuk menyuarakan kebutuhan dan kepentingan mereka, termasuk dalam menuntut kebijakan ekonomi yang lebih inklusif. Dengan adanya ruang yang bebas bagi masyarakat sipil, tekanan terhadap pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan yang berpihak pada kelompok miskin menjadi lebih kuat. Hak-hak politik, seperti hak memilih dan dipilih, memastikan bahwa kelompok masyarakat yang kurang beruntung memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses politik. Ketika kelompok ini memiliki akses terhadap pengambilan keputusan, kebijakan yang lebih berpihak pada pengentasan kemiskinan cenderung lebih mudah diimplementasikan, seperti subsidi sosial, akses layanan kesehatan, dan pendidikan yang lebih baik. Sementara itu, lembaga demokrasi yang efektif, seperti parlemen yang berfungsi dengan baik, pemilu yang adil, dan sistem peradilan yang independen,

memastikan adanya mekanisme check and balance dalam pemerintahan. Lembaga demokrasi yang kuat dapat mencegah korupsi, meningkatkan akuntabilitas, serta memastikan bahwa kebijakan ekonomi dan sosial benar-benar diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kelompok miskin.

Berdasarkan data dari badan pusat statistik pula diketahui hanya satu provinsi saja dari 28 provinsi yang memiliki nilai rata-rata indeks demokrasi dengan kategori baik yaitu provinsi Jawa Timur dengan nilai 80,45, sementara 27 provinsi lainnya memiliki nilai indeks demokrasi dengan kategori sedang. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat demokrasi di Indonesia masih menghadapi tantangan, dengan mayoritas provinsi hanya mencapai kategori sedang dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan sipil, hak-hak politik, dan efektivitas lembaga demokrasi di sebagian besar wilayah belum optimal. Hanya Jawa Timur yang memiliki indeks dengan kategori *baik*, yang berarti provinsi tersebut memiliki kondisi demokrasi yang lebih stabil, dengan kebebasan sipil yang lebih terjamin, partisipasi politik yang lebih kuat, serta institusi demokrasi yang lebih berfungsi dengan baik dibandingkan provinsi lainnya. Sementara itu, masih adanya 27 provinsi dengan kategori sedang menandakan perlunya upaya lebih lanjut dalam memperkuat demokrasi di berbagai daerah untuk meningkatkan transparansi, partisipasi politik, dan perlindungan hak-hak warga negara

Dengan demikian, tidak hanya besar atau kecilnya pengeluaran yang berperan, tetapi juga bagaimana pengeluaran tersebut dikelola dan didistribusikan oleh pemerintah yang akan menentukan efektifitas dalam mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu, kualitas demokrasi tersebut dapat menjadi penentu utama keberhasilan dari berbagai pengeluaran pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia

1.2 Rumusan Masalah

1. Kemiskinan di Indonesia masih menjadi tantangan yang signifikan, yang berkaitan erat dengan upaya negara untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) khususnya tujuan 1, yang bertujuan untuk memberantas

kemiskinan dalam segala bentuknya. Berdasarkan data kemiskinan yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik diketahui bahwa dari 28 provinsi, 12 provinsi di antaranya masih berada di atas rata-rata nasional, pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2023. Kondisi ini mengindikasikan adanya disparitas atau ketimpangan tingkat kemiskinan yang cukup signifikan antar provinsi di Indonesia.

2. Berdasarkan data rata-rata tingkat kemiskinan di Indonesia dari tahun 2011 hingga 2023 yang terbagi dalam tiga wilayah yaitu wilayah barat, wilayah tengah, dan wilayah timur Indonesia terlihat pola yang konsisten bahwa semakin ke arah timur, tingkat kemiskinan cenderung semakin tinggi.
3. Berdasarkan data rata-rata pengeluaran pemerintah bidang pendidikan selama periode 2011-2023, terlihat bahwa sebagian besar provinsi di Indonesia masih mengalokasikan anggaran pendidikan di bawah rata-rata nasional, yaitu 0,98 persen dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Hal tersebut mencerminkan adanya disparitas dalam komitmen dan kapasitas fiskal daerah terhadap pembangunan sektor pendidikan. Jika merujuk pada standar Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) dan *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO), idealnya pengeluaran untuk pendidikan berada pada kisaran 4–6 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara atau wilayah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa seluruh provinsi di Indonesia masih sangat jauh dari standar internasional yang disarankan.
4. Berdasarkan data rata-rata pengeluaran pemerintah bidang kesehatan di 28 provinsi di Indonesia selama tahun 2011–2023, terlihat bahwa sebagian besar provinsi masih mengalokasikan anggaran di bawah rata-rata nasional, yaitu sebesar 0,36 persen dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Bahkan, tidak ada satu pun provinsi yang mampu mencapai atau mendekati angka ideal yang dianjurkan oleh World Health Organization (WHO), yaitu minimal 5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) untuk sektor kesehatan. Hal ini mencerminkan bahwa sektor kesehatan belum menjadi prioritas utama dalam pengalokasian anggaran daerah.

5. Berdasarkan data rata-rata pengeluaran pemerintah bidang perlindungan sosial di 28 provinsi Indonesia selama tahun 2011–2023, terlihat bahwa sebagian besar provinsi masih mengalokasikan anggaran di bawah rata-rata nasional, yaitu sebesar 0,05 persen dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar provinsi belum memberikan perhatian yang memadai terhadap upaya perlindungan sosial, padahal sektor ini sangat penting dalam mengurangi kerentanan sosial dan ekonomi masyarakat miskin dan rentan.
6. Sen (1982) menyatakan bahwa kemiskinan juga dipengaruhi oleh aspek politik yang tercermin pada lemahnya akses terhadap demokrasi. Ketika proses demokrasi tidak berjalan sebagai mestinya dalam lingkungan masyarakat maka kemiskinan tersebut juga akan meningkat. Pernyataan tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gao & Zang (2022) menyatakan bahwa peningkatan kualitas pemerintah, peningkatan kebebasan dalam berbicara, meningkatkan pemberian hak politik dapat menurunkan jumlah kemiskinan.
7. Berdasarkan data dari badan pusat statistik diketahui hanya satu provinsi saja dari 28 provinsi yang memiliki nilai rata-rata indeks demokrasi dengan kategori baik yaitu provinsi Jawa Timur dengan nilai 80,45, sementara 27 provinsi lainnya memiliki nilai indeks demokrasi dengan kategori sedang.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh:

1. Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia
2. Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial terhadap tingkat kemiskinan di wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia
3. Kebebasan sipil, hak – hak politik, dan lembaga demokrasi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia
4. Kebebasan sipil, hak – hak politik, dan lembaga demokrasi terhadap tingkat kemiskinan di wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia

5. Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, pengeluaran pemerintah bidang perlindungan sosial, kebebasan sipil, hak– hak politik, lembaga demokrasi secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan di lakukan penelitian ini maka diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- 1) Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih efektif untuk mengurangi kemiskinan dengan memaksimalkan pengeluaran pemerintah, serta meningkatkan kembali kualitas demokrasi di Indonesia.

- 2) Bagi peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat menambah bahan bacaan serta informasi dan referensi bagi peneliti selanjutnya, khususnya yang ingin mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah, dan kualitas demokrasi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kemiskinan

Kemiskinan menggambarkan suatu keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang penting guna menjalani kehidupan yang layak serta bermartabat (Molo, 2016). Bank Dunia menjelaskan bahwa kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan kekurangan materi, tetapi juga mencerminkan keterbatasan individu dalam mengakses berbagai kesempatan dan pilihan hidup yang penting, seperti layanan kesehatan, standar hidup yang memadai, kebebasan personal, penghargaan terhadap diri, serta rasa dihormati layaknya anggota masyarakat lainnya. Di sisi lain, Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) menekankan bahwa kemiskinan juga mencakup keterbatasan dalam memperluas pilihan hidup. Salah satu indikator yang mereka soroti adalah tidak adanya kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik, yang mencerminkan bentuk kemiskinan non-material.

Kemiskinan juga bisa dipandang sebagai suatu kondisi di mana kelompok tertentu kehilangan akses terhadap sumber daya dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan, sehingga menciptakan ketidakmampuan mereka dalam memelihara efisiensi hidup secara fisik. Masalah ini tidak hanya dialami oleh negara berkembang, tetapi juga oleh negara maju, di mana kemiskinan tetap menjadi tantangan besar. Beberapa definisi kemiskinan menurut para ahli, sebagai berikut :

- 1) Soerjono Soekanto dalam Rosana (2019), kemiskinan merupakan kondisi di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan standar yang berlaku di lingkungan atau kelompok sosialnya. Kemiskinan tidak hanya terkait dengan aspek ekonomi, tetapi juga melibatkan ketidakmampuan seseorang

memanfaatkan sumber daya mental dan fisik untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Hal ini menekankan bahwa kemiskinan juga terkait dengan aspek sosial dan kultural, di mana masyarakat miskin tidak memiliki akses yang memadai untuk mencapai kehidupan yang layak dalam konteks sosial.

- 2) Amartya Sen dalam Adon (2023) memperkenalkan konsep kemiskinan sebagai “*deprivasi kapabilitas*”. Menurutnya, kemiskinan tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi atau kurangnya pendapatan, melainkan dari ketidakmampuan seseorang untuk mencapai fungsi-fungsi dasar kehidupan yang memadai. Sen berargumen bahwa kemiskinan adalah hilangnya kebebasan dalam menentukan pilihan hidup, seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Sen melihat kemiskinan sebagai masalah multidimensional yang memerlukan pendekatan holistik untuk pemberdayaan dan pengembangan kapabilitas masyarakat.
- 3) Levitan dalam Suyanto (2001), mendefinisikan kemiskinan sebagai tidak mampu seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar secara layak, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Levitan juga melihat kemiskinan sebagai fenomena yang melibatkan berbagai faktor sosial-ekonomi, termasuk kurangnya akses terhadap pekerjaan yang layak dan sistem jaminan sosial yang memadai. Definisi ini berfokus pada aspek kesejahteraan dan perlindungan sosial sebagai indikator penting dalam menilai kemiskinan di suatu wilayah.

2.1.1.1 Teori Kemiskinan

1) Teori Human Capital

Teori Sumber Daya Manusia (Human Capital Theory), yang dipopulerkan oleh ekonom Gary Becker pada tahun 1960-an, memandang pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan kemampuan individu sebagai bentuk-bentuk modal yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan ekonomi. Hal ini menekankan pada investasi di bidang pendidikan, pelatihan, dan kesehatan sebagai strategi utama untuk meningkatkan hasil ekonomi individu dan masyarakat. Investasi ini dianggap berharga, sama seperti bentuk modal lainnya, karena

memberikan keuntungan jangka panjang dalam bentuk pendapatan yang lebih tinggi, peningkatan produktivitas, dan peningkatan kualitas hidup.

Teori ini berasumsi bahwa tingkat pendidikan dan keterampilan yang lebih tinggi memberikan peluang kerja yang lebih baik dan pendapatan yang lebih tinggi. Meskipun manfaat dari investasi sumber daya manusia membutuhkan waktu untuk terwujud, investasi ini sangat penting untuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Teori human capital juga menganggap bahwa kesehatan adalah bagian integral dari modal manusia. Individu yang sehat akan lebih produktif dan mampu bekerja lebih lama. Penyakit atau masalah kesehatan dapat mengurangi kapasitas seseorang untuk bekerja dan menghasilkan pendapatan, sehingga kesehatan menjadi komponen penting dalam pengembangan modal manusia.

Modal manusia, yang meliputi pendidikan, keterampilan, dan kesehatan, tersebut berhubungan erat dengan pengurangan kemiskinan. Menurut Heliyon (2019) modal manusia, yang diukur melalui pendidikan dan kesehatan, memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pengurangan kemiskinan. Efek interaktif dari komponen modal manusia menunjukkan dampak jangka panjang terhadap penurunan tingkat kemiskinan.

Selain itu menurut Suharto (2009) dalam memahami kemiskinan, ada dua teori besar atau paradigma yang mendasari, yaitu paradigma Neo-liberal dan Sosial Demokrasi.

1) Paradigma Neo-Liberal

Pada paradigma ini, fokus utama dalam memandang kemiskinan adalah individu dan mekanisme pasar. Pendekatan ini menekankan kebebasan individu sebagai komponen penting dalam kehidupan masyarakat. Kemiskinan dipandang sebagai hasil dari pilihan individu, dan mekanisme pasar dianggap sebagai solusi utama untuk mengatasinya. Paradigma ini berasumsi bahwa dengan memperluas kekuatan pasar dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemiskinan akan teratasi. Intervensi negara dianggap minimal dan hanya diperlukan ketika institusi masyarakat seperti keluarga atau organisasi swadaya tidak mampu lagi menangani

masalah kemiskinan. Pendekatan ini, yang dipopulerkan oleh Bank Dunia, sering menjadi dasar dalam berbagai kajian tentang kemiskinan. Namun, kelemahan paradigma ini adalah terlalu menitikberatkan pada pendapatan sebagai indikator kemiskinan dan mengabaikan keterlibatan langsung orang miskin dalam proses penyelesaian masalah mereka sendiri.

2) Paradigma Sosial Demokrasi

Paradigma ini melihat kemiskinan sebagai masalah struktural, bukan semata-mata tanggung jawab individu. Ketidakadilan dan ketimpangan sosial dianggap sebagai penyebab utama kemiskinan. Paradigma ini mengkritik pasar bebas, namun tetap memandang sistem kapitalis sebagai sistem ekonomi yang paling efektif dalam pengorganisasian masyarakat. Penekanan utama paradigma ini adalah pada kesetaraan dan perlunya jaminan sosial sebagai mekanisme untuk menangani kemiskinan secara institusional. Namun, kelemahan pendekatan ini terletak pada ketergantungan yang tinggi terhadap negara untuk membentuk struktur dan institusi yang tepat. Paradigma ini juga menunjukkan bahwa penyelesaian kemiskinan tidak hanya bergantung pada kemampuan individu, tetapi juga pada bagaimana struktur sosial memberikan akses yang setara bagi setiap kelompok untuk mencapai kemandirian dan kebebasan.

2.1.1.2 Penyebab Kemiskinan

Menurut pandangan Bank Dunia, salah satu faktor utama penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendapatan serta keterbatasan kepemilikan aset yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal yang layak, layanan kesehatan, dan akses pendidikan. Selain itu, kemiskinan juga erat kaitannya dengan kurangnya ketersediaan lapangan kerja yang memadai. Umumnya, kelompok masyarakat yang tergolong miskin terdiri dari individu dengan tingkat pendidikan yang rendah, kondisi kesehatan yang kurang baik, dan tidak memiliki pekerjaan tetap. Situasi ini menunjukkan bahwa hambatan ekonomi serta keterbatasan akses terhadap layanan dasar menjadi faktor penting yang memperparah kondisi kemiskinan.

Kuncoro (1997) menyatakan bahwa penyebab kemiskinan dapat dianalisis dari dua aspek yang saling berhubungan: sosial dan ekonomi. Faktor ekonomi yang utama adalah terbatasnya akses penduduk terhadap kesempatan kerja, di mana tingkat ketenagakerjaan diukur dari rasio jumlah orang yang bekerja terhadap total angkatan kerja. Faktor ekonomi lainnya adalah keterbatasan akses terhadap faktor produksi, seperti kesulitan memperoleh modal usaha, akses pasar, dan kepemilikan aset yang terbatas. Dari perspektif sosial, kemiskinan dipengaruhi oleh rendahnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Di banyak negara berkembang, kesempatan pendidikan yang terbatas mengakibatkan produktivitas yang rendah, yang berujung pada berkurangnya tingkat pendapatan. Selain itu, akses yang tidak memadai terhadap layanan kesehatan memperburuk kemiskinan, karena infrastruktur kesehatan di negara-negara berkembang tertinggal jauh di belakang negara-negara maju.

2.1.1.3 Jenis – Jenis Kemiskinan

a) Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural adalah suatu kondisi di mana kemiskinan muncul karena faktor budaya dan kebiasaan yang menghalangi individu atau kelompok untuk meningkatkan taraf hidupnya. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Oscar Lewis, yang menyatakan bahwa kemiskinan tidak semata-mata terkait dengan faktor ekonomi, tetapi juga terkait erat dengan pola pikir, nilai, dan praktik budaya yang berlaku di dalam suatu masyarakat. Individu yang mengalami kemiskinan kultural sering kali menunjukkan perilaku pasif, tidak memiliki keinginan untuk berubah, dan cenderung menerima keadaan mereka sebagai takdir yang tidak dapat diubah (Lewis, 1959).

b) Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah jenis kemiskinan yang disebabkan oleh ketidakadilan dalam sistem ekonomi, sosial, dan politik yang ada di masyarakat. Kondisi ini terjadi ketika kebijakan dan struktur sosial yang ada tidak mendukung akses yang setara terhadap sumber daya dan kesempatan, sehingga kelompok tertentu terjebak dalam kemiskinan secara terus-menerus. Ketimpangan dalam distribusi kekayaan, akses

terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta ketidaksetaraan dalam kesempatan kerja merupakan faktor utama yang memperparah kemiskinan struktural. Menurut Oscar Lewis (1998), dalam studinya tentang “*Culture of Poverty*”, juga menyebutkan kemiskinan struktural sebagai bagian dari masalah yang lebih besar yang melibatkan sistem ekonomi dan politik yang menguntungkan kelompok elit. Menurutnya, kemiskinan struktural terjadi ketika kelompok masyarakat miskin tidak memiliki akses ke modal, pendidikan, dan kesempatan yang diperlukan untuk mengubah kondisi ekonominya, memperkuat siklus kemiskinan antar generasi.

c) Kemiskinan Absolut

Menurut Arsyad (1988), Kemiskinan absolut diukur dari ketidakmampuan individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kondisi ini terjadi ketika pendapatan suatu populasi secara signifikan berada di bawah standar hidup yang dibutuhkan. Penyebab kemiskinan absolut bisa bermacam-macam, mulai dari konflik dan kesenjangan ekonomi hingga lemahnya kapasitas pemerintah dalam menangani masalah sosial dan ekonomi.

d) Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif terjadi ketika pembangunan tidak merata, yang mengakibatkan perbedaan pendapatan antar kelompok sosial. Menurut Wahyu (2009), standar kemiskinan relatif ditentukan oleh kondisi hidup suatu negara pada waktu tertentu dan diukur berdasarkan kondisi golongan masyarakat yang paling miskin. Ketimpangan ini terjadi sebagai akibat dari kebijakan pembangunan yang tidak mengakomodasi kesejahteraan semua lapisan masyarakat secara merata.

2.1.2 Peran Pemerintah

Menurut Mangkoesoebroto (2008), peran pemerintah dalam perekonomian suatu negara sangatlah penting, yang dapat terlihat dari berbagai kebijakan publik yang diambil untuk mengatur dan mengarahkan pembangunan. Sejak era klasik, Adam Smith telah menjelaskan tiga fungsi dasar pemerintah, yaitu: pertama, menjaga ketertiban dan keamanan dalam negeri; kedua, menegakkan sistem hukum yang adil; dan ketiga, menyediakan barang-barang publik seperti jalan raya, bendungan, dan

infrastruktur penting lainnya yang tidak dapat disediakan secara efisien oleh sektor swasta. Dalam konteks ekonomi modern, peran pemerintah berkembang dan dapat dikelompokkan ke dalam tiga fungsi utama, yaitu:

1. Fungsi alokasi: Salah satu peran penting pemerintah adalah memastikan tersedianya barang dan jasa publik yang tidak dapat disediakan secara optimal oleh mekanisme pasar, seperti layanan pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur. Alokasi anggaran pemerintah untuk sektor pendidikan dan kesehatan mencerminkan pelaksanaan fungsi alokasi dalam kebijakan fiskal. Investasi di bidang ini berperan strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong terjadinya mobilitas sosial. Kehadiran infrastruktur sosial yang memadai menjadi dasar penting bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah untuk melepaskan diri dari kondisi kemiskinan yang berkelanjutan.
2. Fungsi distribusi: Pemerintah berperan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan distribusi, seperti sistem perpajakan progresif dan subsidi. Pengeluaran pemerintah dalam perlindungan sosial seperti bantuan sosial, subsidi kebutuhan dasar, serta program jaminan sosial bertujuan langsung untuk membantu kelompok rentan. Fungsi ini sangat relevan dalam mengatasi kemiskinan ekstrem dan memberikan jaring pengaman bagi masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah.
3. Fungsi stabilisasi: Melalui kebijakan fiskal dan moneter, pemerintah bertugas menjaga kestabilan ekonomi, termasuk pengendalian inflasi, pertumbuhan ekonomi yang sehat, dan tingkat pengangguran yang rendah. Stabilitas makroekonomi juga dipengaruhi oleh seberapa besar pemerintah mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi, termasuk penanaman modal asing. Ketika penanaman modal asing masuk secara merata dan produktif, akan menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing, dan turut berkontribusi dalam penurunan angka kemiskinan. Di sisi lain, kualitas demokrasi melalui kebebasan sipil, perlindungan hak-hak politik, dan keberadaan lembaga-lembaga demokratis yang kuat dapat

meningkatkan kepercayaan investor serta memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik, sehingga program-program pemerintah menjadi lebih efektif dan berdampak terhadap pengurangan kemiskinan.

2.1.3 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan bagian integral dari kebijakan fiskal, yaitu kebijakan ekonomi makro di mana pemerintah, biasanya melalui kerja sama dengan kementerian keuangan, memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengarahkan perekonomian nasional. Pengeluaran ini mencerminkan total biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dalam satu tahun anggaran untuk menjalankan berbagai program dan kebijakan publik. Secara umum, kebijakan fiskal mencakup keputusan terkait besarnya penerimaan dan belanja negara yang bertujuan untuk mempengaruhi kondisi ekonomi secara keseluruhan. Seluruh keputusan fiskal ini tertuang dalam dokumen resmi negara yang dikenal dengan nama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Bank Dunia, pengeluaran pemerintah meliputi seluruh bentuk pengeluaran yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk pembelian barang dan jasa, pembayaran gaji aparatur negara, serta transfer seperti subsidi dan bantuan sosial.

Menurut Suparno (2015), pengeluaran pemerintah memiliki peran penting dalam mendorong pembentukan modal, terutama melalui investasi di berbagai sektor seperti infrastruktur, yang sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Dumairy (2009) dalam Taher (2019) menjelaskan bahwa kebijakan pengeluaran belanja pemerintah mencakup beberapa fungsi, yaitu stabilitatif, alokasi, dinamisatif, dan distributif. Fungsi-fungsi ini berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi, mengalokasikan sumber daya secara efisien, mendukung dinamika perekonomian, serta mendistribusikan hasil pembangunan secara merata.

2.1.3.1 Teori Pengeluaran Pemerintah

1) Teori Wagner

Wagner mengemukakan bahwa terdapat lima faktor utama yang mendorong peningkatan belanja pemerintah dari waktu ke waktu. Faktor-faktor tersebut

mencakup meningkatnya kebutuhan akan sektor pertahanan dan keamanan, naiknya pendapatan per kapita masyarakat, laju urbanisasi yang mengikuti pertumbuhan ekonomi, perkembangan sistem demokrasi, serta adanya ketidakefisienan dalam birokrasi pemerintahan. Gagasan ini berakar pada teori negara sebagai suatu organisme, yang melihat pemerintah sebagai lembaga otonom yang dapat mengambil keputusan dan bertindak sendiri, tanpa harus selalu bergantung pada partisipasi langsung dari masyarakat.

2) Teori WW Rostow dan RA Musgrave

Musgrave dan Rostow mengemukakan bahwa pertumbuhan belanja pemerintah memiliki kaitan erat dengan tahapan pembangunan ekonomi yang dilalui suatu negara. Menurut Musgrave, seiring kemajuan pembangunan, proporsi total investasi terhadap pendapatan nasional cenderung meningkat, namun kontribusi investasi dari sektor pemerintah justru mengalami penurunan. Sementara itu, Rostow menyoroti bahwa ketika suatu negara telah mencapai tahap pembangunan yang lebih tinggi, arah belanja pemerintah akan bergeser dari fokus pada pembangunan infrastruktur ekonomi menuju penyediaan layanan sosial, seperti pendidikan dan kesehatan. Pandangan ini didasarkan pada analisis perkembangan belanja publik di berbagai negara yang tengah berada dalam proses pembangunan ekonomi.

2.1.3.2 Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan unsur krusial dalam pembentukan modal manusia, yang dipandang sebagai bentuk investasi produktif terhadap kualitas sumber daya manusia dan memiliki peran langsung dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Todaro dan Smith (2011) menyatakan bahwa pendidikan mampu mengembangkan pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan manajerial individu, yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Lebih jauh, Pasal 26 dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948) menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan dasar harus disediakan secara gratis dan bersifat wajib, sementara jenjang pendidikan menengah dan tinggi perlu dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing individu.

Pengeluaran adalah masukan penting ke dalam sistem pendidikan, di mana hal tersebut mencerminkan komitmen nasional terhadap pendidikan dan memiliki implikasi untuk kesetaraan. Pengeluaran untuk pendidikan menurut standar *Perserikatan Bangsa - Bangsa* (PBB) dan *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) idealnya berada pada kisaran 4-6% dari PDB atau 15-20% dari total anggaran pemerintah. Standar ini ditujukan untuk mendukung pelaksanaan program pendidikan yang dapat diakses, inklusif, dan berkualitas bagi semua anak dan dewasa di berbagai negara. Kedua indikator tersebut diharapkan mampu mendorong mobilisasi sumber daya secara optimal guna mendukung pelaksanaan berbagai program dan kebijakan yang bertujuan untuk menghapus kemiskinan. Alokasi anggaran yang diberikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya melalui penguatan infrastruktur pendidikan serta pengembangan kompetensi tenaga pendidik melalui pelatihan yang berkelanjutan. Wahyudi (2020) menyebutkan bahwa anggaran pendidikan semakin difokuskan pada penguatan infrastruktur dan pengembangan tenaga pendidik guna menghasilkan lulusan yang lebih kompeten dan siap menghadapi tantangan global. (Baldacci et al., 2005) menekankan pentingnya mengarahkan investasi modal manusia lebih besar pada pendidikan dasar, sebagai fondasi untuk mencapai pemerataan dan pembangunan yang berkelanjutan. Pendidikan, sebagai hak dasar setiap warga negara, juga memiliki peran kunci dalam memperkuat hubungan antara peningkatan sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi.

2.1.3.3 Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan

Kesehatan adalah kebutuhan mendasar yang mempengaruhi produktivitas dan pembangunan ekonomi suatu negara. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menggambarkan kesehatan sebagai kondisi kesejahteraan yang menyeluruh, mencakup aspek fisik, mental, dan sosial. Definisi ini menekankan bahwa kesehatan bukan sekadar ketiadaan penyakit atau kelemahan, melainkan mencerminkan keadaan utuh yang memungkinkan individu menjalani kehidupan secara optimal dalam berbagai dimensi. Definisi ini menekankan bahwa kesehatan tidak hanya dilihat dari tidak

adanya penyakit atau kondisi fisik yang baik saja, tetapi juga mencakup aspek kesejahteraan mental dan sosial. WHO menganggap kesehatan sebagai hak asasi manusia dan elemen kunci dalam mencapai kualitas hidup yang baik. Para ekonom melihat kesehatan sebagai salah satu modal penting yang berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi. Kesehatan juga dipandang sebagai investasi yang memiliki pengembalian positif bagi individu dan masyarakat, sehingga dapat dianggap sebagai faktor produksi yang berperan dalam meningkatkan nilai tambah barang dan jasa. Mills and Gilson (1988) mengemukakan bahwa ekonomi kesehatan berkaitan dengan alokasi sumber daya dalam sektor kesehatan, pembiayaan, efisiensi, serta dampak pencegahan dan pengobatan terhadap kesejahteraan individu dan masyarakat.

World Health Organization (WHO) menganjurkan bahwa negara sebaiknya mengalokasikan setidaknya 5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) untuk sektor kesehatan. WHO juga merekomendasikan alokasi sekitar 15% dari total anggaran pemerintah untuk pengeluaran kesehatan. Angka ini dikenal sebagai target Abuja, yang disepakati oleh negara-negara Afrika pada tahun 2001 dan juga menjadi acuan bagi banyak negara berkembang untuk meningkatkan investasi di sektor kesehatan. Pengeluaran ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan pembiayaan yang cukup dan adil, terutama untuk kelompok rentan seperti penduduk miskin, lanjut usia, dan anak terlantar. Belanja kesehatan juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pembangunan nasional. (Mustaqimah et al., 2017) pengeluaran pemerintah untuk kesehatan memiliki dampak positif pada peningkatan hasil kesehatan, yang pada gilirannya berkontribusi untuk mengurangi kemiskinan. Hubungan ini menyoroti pentingnya investasi publik dalam kesehatan sebagai strategi pengentasan kemiskinan di Indonesia. Sumber pembiayaan kesehatan dapat berasal dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta dari pihak swasta, seperti perusahaan dan lembaga asuransi kesehatan. Pendanaan ini disusun sebagai bagian dari upaya untuk menjamin keberlanjutan pembangunan di sektor kesehatan, dengan tujuan mencapai tingkat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Hal ini sejalan dengan

amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

2.1.3.4 Pengeluaran Pemerintah Bidang Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional dan memegang peran kunci dalam mengurangi kemiskinan serta menekan tingkat ketimpangan. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), perlindungan sosial mencakup berbagai kebijakan dan program yang dirancang secara sistematis untuk mencegah serta mengurangi risiko kemiskinan dan kerentanan, mencakup seluruh tahapan kehidupan individu. Perlindungan sosial mencakup berbagai instrumen dan program yang bertujuan untuk memberikan dukungan bagi individu atau kelompok yang rentan terhadap risiko sosial dan ekonomi. Dalam konteks tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 1 yang menargetkan penghapusan kemiskinan, Target 1.3 menekankan pentingnya menerapkan sistem perlindungan sosial yang mencakup seluruh penduduk, terutama bagi yang miskin dan rentan, untuk memastikan adanya jaring pengaman sosial yang efektif. Menurut Suharto (2015), perlindungan sosial merupakan bentuk intervensi yang dilakukan oleh pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat untuk membantu penduduk miskin melalui transfer pendapatan atau konsumsi. Selain itu, perlindungan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi kelompok rentan dari berbagai risiko dalam kehidupan, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan dan posisi sosial kelompok yang selama ini tersisihkan.

International Labour Organization (ILO) melalui Rekomendasi 202 (Social Protection Floors Recommendation, 2012) menganjurkan bahwa setiap negara harus menyediakan jaminan dasar perlindungan sosial (social protection floors) yang mencakup : Akses ke layanan kesehatan yang esensial, serta jaminan pendapatan dasar untuk anak-anak, orang tua, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.

Hubungan antara pengeluaran perlindungan sosial dan kemiskinan sangat erat, karena alokasi belanja untuk perlindungan sosial bertujuan langsung untuk mengurangi beban ekonomi kelompok miskin dan rentan. Program-program ini membantu menyediakan

kebutuhan dasar, meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, serta menciptakan jaring pengaman sosial yang melindungi masyarakat dari dampak ekonomi yang merugikan. Dengan demikian, pengeluaran untuk perlindungan sosial memainkan peran penting dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan mendorong kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

2.1.4 Kualitas Demokrasi

Irawan (2007) menjelaskan bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang bersumber pada kehendak rakyat, di mana kekuasaan berada di tangan masyarakat. Dalam sistem ini, pengelolaan negara dilakukan oleh rakyat secara langsung maupun melalui persetujuan mereka, karena prinsip kedaulatan rakyat menjadi landasan utama. Demokrasi menjadi pilihan sistem pemerintahan yang diadopsi oleh banyak negara di dunia, yang awalnya muncul dari perjuangan masyarakat Barat untuk memperoleh kesetaraan hak dan perlakuan di hadapan hukum.

Sementara itu, menurut Dahl (2008) sebagaimana dirangkum dalam laporan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2009 oleh UNDP Indonesia (2011), demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang ditandai dengan sejumlah karakteristik, antara lain

1. Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk membentuk serta bergabung dalam organisasi sosial atau politik
2. Terdapat jaminan kebebasan dalam menyampaikan pendapat atau pandangan secara terbuka
3. Setiap individu memiliki peluang yang sama untuk mencalonkan diri dalam jabatan publik.
4. Proses demokrasi memungkinkan terjadinya persaingan antar warga dalam memperoleh dukungan masyarakat untuk menduduki posisi-posisi strategis dalam pemerintahan..
5. Warga negara diberikan hak untuk memberikan suara dalam pemilihan umum sebagai bentuk partisipasi politik.

6. Pelaksanaan pemilu dilakukan secara adil dan bebas dari kecurangan, guna menjamin legitimasi hasilnya.
7. Masyarakat memiliki akses terhadap berbagai sumber informasi independen, tidak hanya yang bersumber dari pemerintah
8. Sistem demokrasi memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah mencerminkan aspirasi rakyat, dengan mekanisme pemilihan umum yang berlangsung secara berkala untuk menilai kinerja serta mempertanggungjawabkan tindakan pemerintah

Menurut Djiwandono (2003), terdapat beberapa unsur utama yang menjadi fondasi penting dalam pelaksanaan demokrasi, yaitu:

1. Pengakuan terhadap kesetaraan warga negara. Setiap individu memiliki kedudukan yang sama dalam masyarakat tanpa perbedaan status yang menempatkan satu lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain
2. Dominasi nilai-nilai individu dalam membentuk demokrasi. Demokrasi tidak berdiri secara netral atau hampa nilai, melainkan dibentuk oleh norma dan prinsip yang hidup dalam masyarakat
3. Pemerintah sebagai pelayan publik. Dalam sistem demokrasi, pemerintahan tidak berperan sebagai penguasa mutlak, melainkan sebagai representasi dan pelaksana kehendak rakyat, yang merupakan pemegang kedaulatan sejati
4. Toleransi dari kelompok mayoritas terhadap minoritas. Prinsip ini mencerminkan pentingnya sikap saling menghargai, melindungi, dan membina hubungan yang harmonis antara kelompok yang dominan dan yang lebih kecil.
5. Pengambilan keputusan melalui musyawarah. Setiap keputusan penting harus dibahas secara bersama, bukan ditentukan sepihak oleh mayoritas agar tidak menimbulkan dominasi atau tirani atas kelompok lain
6. Penegakan hukum yang berlaku untuk semua. Supremasi hukum merupakan pilar utama dalam demokrasi; tanpa aturan hukum yang adil dan merata, sistem demokrasi berisiko menjadi kacau atau anarkis

7. Adanya prosedur yang sah dalam mencapai tujuan bersama. Setiap tindakan dalam sistem demokrasi harus mengikuti mekanisme yang telah disepakati, agar proses pelaksanaannya selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi yang baik dan benar.

Menurut Badan Pusat Statistik, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) disusun sebagai alat ukur kuantitatif untuk memantau sejauh mana perkembangan demokrasi berlangsung di Tanah Air. IDI tidak hanya menggambarkan dinamika demokrasi secara nasional, tetapi juga memberikan gambaran mengenai capaian demokrasi di tingkat provinsi. Dalam pelaksanaannya, pengukuran IDI tidak semata-mata menilai kinerja lembaga eksekutif atau birokrasi pemerintah, melainkan juga mempertimbangkan kontribusi masyarakat sipil, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, aparat penegak hukum, serta lembaga peradilan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas demokrasi sebagaimana tercermin dalam IDI merupakan tanggung jawab kolektif dari seluruh elemen bangsa, bukan semata menjadi beban pemerintah semata.

Pengukuran tingkat demokrasi di Indonesia dilakukan dengan menilai sejauh mana pelaksanaan dan kemajuan aspek-aspek demokrasi yang berlangsung di seluruh provinsi. Dalam penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), terdapat tiga dimensi utama yang menjadi dasar penilaian, yaitu:

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*)

Dimensi ini mencakup berbagai bentuk kebebasan dasar yang harus dijamin dalam negara demokratis, antara lain:

- a. Kebebasan untuk berkumpul dan membentuk organisasi atau kelompok
- b. Kebebasan dalam menyampaikan pendapat secara terbuka
- c. Kebebasan dalam memilih dan menjalankan keyakinan beragama
- d. Perlindungan terhadap warga negara dari tindakan diskriminatif

2. Hak-Hak Politik (*Political Rights*)

Aspek ini menekankan pentingnya partisipasi politik warga negara, yang meliputi:

- a. Hak setiap individu untuk memilih maupun mencalonkan diri dalam pemilihan umum

- b. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik dan dalam fungsi pengawasan terhadap kebijakan publik

3. Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*)

Elemen ini menilai peran dan fungsi institusi-institusi demokratis di tingkat lokal, yang mencakup:

- a. Penyelenggaraan pemilu yang berlangsung secara adil, jujur, dan bebas
- b. Fungsi dan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
- c. Peran partai politik dalam sistem demokrasi
- d. Kinerja birokrasi pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan
- e. Independensi lembaga peradilan dalam menegakkan hukum secara adi

Proses penilaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dilakukan melalui berbagai pendekatan metodologis, antara lain melalui analisis isi dari pemberitaan media cetak, penelaahan dokumen relevan, diskusi kelompok terfokus (Focus Group Discussion/FGD), serta wawancara mendalam dengan narasumber yang memiliki pemahaman komprehensif mengenai dimensi-dimensi demokrasi di wilayah tempat tinggal mereka. Informasi yang diperoleh dari berbagai metode tersebut kemudian diproses dan diberi skor dalam skala 0 hingga 100. Hasil akhir dari penilaian tersebut diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yakni: skor di bawah 60 dikategorikan sebagai *buruk*, skor antara 60 hingga 80 sebagai *sedang*, dan skor di atas 80 sebagai *baik* (IDI, 2019).

2.1.4.1 Teori Kualitas Demokrasi

1) Teori Acemoglu

Daron Acemoglu, seorang ekonom terkemuka, mengembangkan teori tentang kesejahteraan yang menitikberatkan pada peran lembaga politik dan ekonomi. Dalam buku *Why Nations Fail* yang ditulis bersama James A. Robinson, Acemoglu membagi institusi politik dan ekonomi ke dalam dua kategori utama, yaitu: institusi yang inklusif dan institusi yang ekstraktif. Mereka berpendapat bahwa kemajuan dan kemakmuran suatu negara hanya dapat terwujud apabila sistem politik yang dianut bersifat inklusif yaitu sistem yang mendorong partisipasi luas masyarakat dan

menjamin perlindungan atas hak-hak individu dalam pengambilan keputusan politik dan ekonomi. Negara-negara yang didominasi oleh institusi politik dan ekonomi yang ekstraktif cenderung tetap berada dalam kondisi kemiskinan, sementara negara yang memiliki institusi inklusif lebih berpeluang untuk mencapai kesejahteraan (Karim, 2024).

Institusi politik inklusif dapat diartikan sebagai sistem yang tidak hanya menguntungkan segelintir elite berkuasa, tetapi juga memungkinkan masyarakat luas untuk terlibat aktif dalam proses politik. Dengan kata lain, sistem politik yang dapat mendorong kemakmuran adalah sistem yang bersifat pluralistik. Selain memberikan akses politik yang lebih terbuka, institusi politik inklusif juga ditandai oleh adanya mekanisme checks and balances guna membatasi kekuasaan elite, serta penerapan supremasi hukum yang menjamin hak seluruh warga negara. Acemoglu dan Robinson berpendapat bahwa keberadaan institusi politik yang inklusif akan mendorong terbentuknya institusi ekonomi yang bersifat inklusif pula. Ciri utama dari institusi ekonomi inklusif adalah adanya perlindungan terhadap hak milik dan hak paten, kemudahan dalam menjalankan usaha, akses pasar yang terbuka, serta peran aktif negara dalam menyediakan pendidikan dan menciptakan kesempatan yang setara bagi semua warga negara dalam kegiatan ekonomi (Karim, 2024).

2) Teori Good Governance

Good Konsep *good governance* menekankan bahwa pemerintahan yang ideal adalah pemerintahan yang berfokus pada pelayanan kepada masyarakat, bukan semata-mata pada kepentingan birokrasi. Dalam hal ini, pemerintah dituntut untuk melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh, termasuk menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan dalam tata kelola lembaga negara guna mencegah terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (Muhammad, 2019). Secara umum, teori *good governance* menitikberatkan pada penerapan nilai-nilai seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, efektivitas, efisiensi, serta kepatuhan terhadap aturan hukum. Asumsi dasar dari teori ini adalah bahwa kualitas pemerintahan yang

baik akan menciptakan kondisi yang kondusif untuk pembangunan ekonomi dan sosial, termasuk pengurangan kemiskinan. Jika pemerintahan memiliki tata kelola yang baik, maka alokasi pengeluaran pemerintah dan investasi asing akan lebih efisien, tepat sasaran, dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, jika kualitas pemerintahan buruk, seperti adanya korupsi, birokrasi yang tidak efisien, atau ketidakpatuhan hukum, maka pengeluaran pemerintah dan FDI cenderung tidak memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan. Tata kelola yang baik juga dapat menarik lebih banyak investasi asing karena adanya kepastian hukum dan lingkungan bisnis yang stabil, yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan.

2.1.4.2 Aspek Kebebasan Sipil (Civil Liberties)

Pengertian mengenai kebebasan sipil dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merujuk pada pandangan Bealey (1999), yang menyatakan bahwa konsep *civil liberties* berkaitan erat dengan hak untuk menyatakan pendapat, kebebasan bergerak, serta perlindungan dari tindakan penahanan yang sewenang-wenang. Meskipun belum terdapat definisi tunggal yang disepakati secara luas, kebebasan sipil umumnya mencakup hak atas kebebasan berpendapat, kebebasan pers, kebebasan untuk berkumpul dan membentuk organisasi, serta kebebasan dalam menjalankan agama dan keyakinan (Bealey & Johnson, 1999). Gagasan ini berpijak pada pemahaman bahwa kebebasan individu merupakan pilar fundamental dalam sistem demokrasi, karena tanpa adanya kebebasan, masyarakat tidak memiliki ruang untuk mengawasi dan meminta pertanggungjawaban dari pemerintah.

Kebebasan sipil kerap kali berada dalam posisi rentan akibat dua bentuk ancaman utama. Pertama, ancaman yang berasal dari otoritas negara, atau yang dikenal sebagai *supreme coercive authority*. Dalam konteks ini, pemerintah sering kali membatasi ruang kebebasan sipil, khususnya dalam hal kebebasan berpendapat dan berserikat, karena dianggap berpotensi mengganggu kekuasaan politik yang mereka miliki. Kedua, terdapat ancaman yang dikemukakan oleh John Stuart Mill sebagai bentuk *tirani mayoritas (tyranny of the majority)*, yaitu ketika tekanan untuk membatasi

kebebasan tidak datang dari negara, melainkan dari kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat itu sendiri. Dalam situasi seperti ini, pembatasan atas hak-hak sipil dapat muncul akibat tekanan sosial yang menekan perbedaan pandangan atau keyakinan (Bealey & Johnson, 1999).

Dalam kerangka pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), kebebasan sipil dipahami sebagai hak individu maupun kelompok yang erat kaitannya dengan pengaruh kekuasaan negara serta tekanan dari kelompok sosial tertentu. Untuk mengumpulkan data yang relevan dalam penyusunan IDI, dimensi kebebasan sipil ini dijabarkan ke dalam empat indikator utama, yaitu: (1) kebebasan untuk membentuk serta bergabung dalam organisasi atau perkumpulan, (2) kebebasan dalam menyampaikan pendapat, (3) kebebasan dalam memeluk dan menjalankan keyakinan, serta (4) kebebasan dari tindakan diskriminatif yang tidak didasarkan pada agama.

2.1.4.3 Hak-Hak Politik (Political Rights)

Menurut Bollen (1993), menyatakan bahwa hak-hak politik hadir ketika pemerintah nasional bertanggung jawab kepada seluruh warga negara, dan setiap individu memiliki hak untuk terlibat dalam proses pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Pernyataan ini mengandung makna bahwa partisipasi aktif dan adanya kompetisi dalam ranah politik merupakan bagian tak terpisahkan dari hak-hak politik. Menyadari pentingnya aspek ini, Robert Dahl (2008) mengidentifikasi lima indikator kunci yang merefleksikan dimensi hak politik, yaitu: hak warga negara untuk memberikan suara dalam pemilu, hak mencalonkan diri dalam jabatan publik, hak untuk berkompetisi dalam memperoleh dukungan pemilih, terselenggaranya pemilu yang berlangsung secara adil dan bebas, serta kebijakan publik yang dirumuskan mencerminkan aspirasi masyarakat.

Dalam kerangka pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), dimensi hak-hak politik ini dirumuskan ke dalam dua variabel utama, yakni: (1) hak untuk memilih dan dicalonkan dalam pemilu, serta (2) partisipasi warga dalam proses perumusan keputusan politik dan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

2.1.4.4 Aspek Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*)

Dalam sistem demokrasi, lembaga merupakan institusi negara yang berfungsi untuk memastikan prinsip-prinsip demokrasi dapat diterapkan dan dijalankan secara efektif. Berdasarkan laporan IDI (2009), lembaga demokrasi diklasifikasikan ke dalam dua level utama. Tingkatan pertama adalah *suprastruktur politik*, yang meliputi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif sebagai pilar utama penyelenggara negara. Tingkatan kedua adalah *infrastruktur politik*, yang mencakup berbagai instrumen pendukung seperti pemilihan umum, partai politik, media massa, serta kelompok kepentingan yang turut mewarnai dinamika demokrasi.

Untuk menilai kinerja lembaga-lembaga demokratis, IDI menggunakan lima indikator utama, yaitu: (1) kualitas pelaksanaan pemilihan umum yang bebas dan adil, (2) peran aktif DPRD dalam menjalankan fungsi legislatif, (3) kontribusi partai politik dalam proses demokratisasi, (4) profesionalisme dan netralitas birokrasi pemerintahan daerah, serta (5) independensi lembaga peradilan dalam menegakkan hukum.

2.2 Tinjauan Empiris

Penulis telah mempelajari sejumlah penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang akan di teliti sebelum melakukan penelitian ini. Daftar peneliti yang dimaksud tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Penulis / Judul / Tahun	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil
Daria Popova <i>Impact of Equity in Social Protection Spending on Income Poverty and Inequality</i> (2023)	Pengeluaran perlindungan sosial, kemiskinan, ketimpangan	- Analisis data dalam metode ini bersifat kuantitatif - Data yang digunakan merupakan data sekunder dari tahun 1998-2017	Temuan menunjukkan bahwa distribusi yang adil dalam pengeluaran perlindungan sosial dapat secara signifikan mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

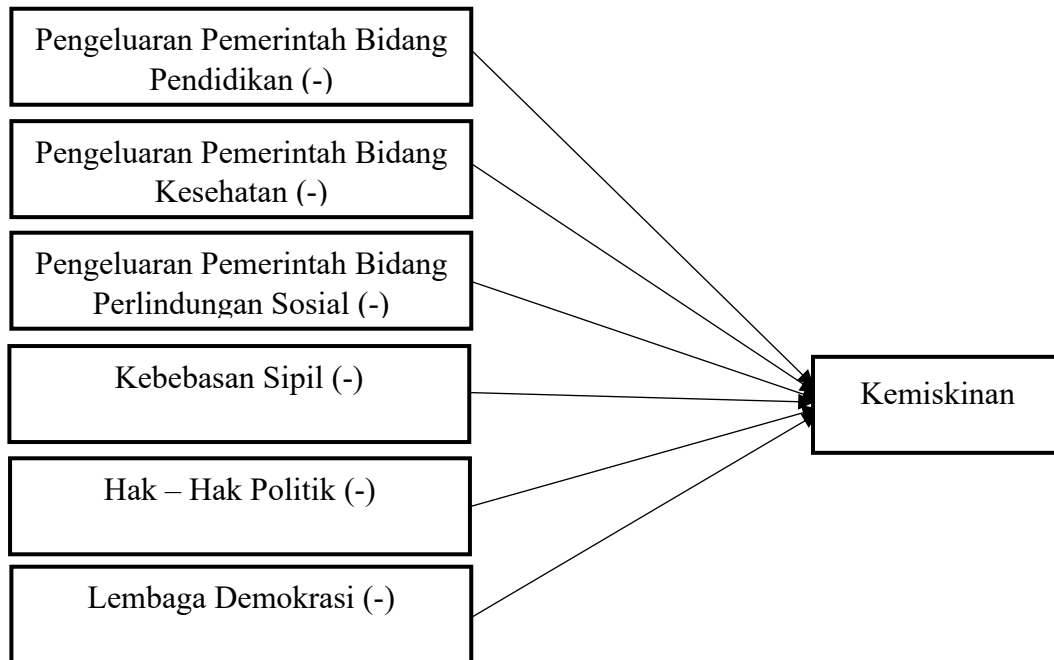
Penulis / Judul / Tahun	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil
		Metode yang digunakan adalah regresi data panel	
Hidayat & Azhar Analisis Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan, Pendidikan, dan Infrastruktur Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia (2022)	Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan kemiskinan	- Analisis data dalam metode ini bersifat kuantitatif - Data yang digunakan merupakan data sekunder dari tahun 2017-2019 - Metode yang digunakan adalah regresi data panel dengan <i>random effect model</i> (REM)	Hasil penelitian ini menunjukkan pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan dan pendidikan berpengaruh negatif dalam menurunkan tingkat kemiskinan, sementara variabel pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan.
Gao & Zang <i>Is democracy pro-poor? An empirical test of the Sen Hypothesis based on global evidence</i> (2022)	Tingkat kemiskinan, Demokrasi	- Analisis data dalam metode ini bersifat kuantitatif - Data yang digunakan merupakan data sekunder dari tahun 1995-2015 - Metode yang digunakan adalah regresi data panel	Hasil penelitian menyatakan bahwa peningkatan kualitas pemerintah, peningkatan kebebasan dalam berbicara, meningkatkan pemberian hak politik dapat menurunkan jumlah kemiskinan.
Weilin Liu <i>Rural Public Expenditure and Poverty Alleviation in China: A Spatial</i>	Pengeluaran publik untuk pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, infrastruktur, lingkungan	- Analisis data dalam metode ini bersifat kuantitatif - Data yang digunakan merupakan	Pengeluaran untuk pendidikan, perawatan kesehatan, jaminan sosial dan infrastruktur semuanya telah menunjukkan dampak pengentasan

Penulis / Judul / Tahun	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil
<i>Econometric Analysis</i> (2020)	hidup, dan tingkat kemiskinan	data sekunder dari tahun 2010-2016 - Metode yang digunakan adalah spatial econometric model	kemiskinan yang baik, sementara pengeluaran lingkungan hidup tidak memiliki dampak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan.
Marisa Hidalgo-Hidalgo dan Inigo Iturbe-Ormaetxe <i>Long-run effects of public expenditure on poverty</i> (2018)	Pengeluaran publik pada sektor pendidikan, dan Tingkat kemiskinan pada masa dewasa	- Analisis data dalam metode ini bersifat kuantitatif - Data yang digunakan merupakan data sekunder - Metode yang digunakan adalah regresi data panel dinamis	Pengeluaran publik untuk pendidikan memiliki efek jangka panjang yang kuat dalam mengurangi kejadian kemiskinan di masa dewasa.
Aguilar, Kristobal Miguel Meléndez. <i>The Impact of democracy on poverty levels</i> (2016)	ketimpangan, kebebasan sipil, tindakan politik, elemen prosedural, kemiskinan, kinerja kebijakan publik, demokrasi dan persepsi terhadap kualitas demokrasi.	- Analisis data dalam metode ini bersifat kuantitatif - Data yang digunakan merupakan data sekunder Metode yang digunakan adalah regresi linier berganda	Studi ini menemukan bahwa demokrasi memiliki dampak positif dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Proses demokratis memungkinkan konteks yang lebih baik dan mendorong partisipasi warga negara dalam mempengaruhi kebijakan publik yang efektif dalam pengentasan kemiskinan.
Houqi Hong <i>Government Spending on</i>	Pengeluaran pemerintah untuk barang publik	- Analisis data dalam metode ini bersifat kuantitatif	Pengeluaran pendidikan dan kesehatan secara langsung mengurangi

Penulis / Judul / Tahun	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil
<i>Public Goods: Evidence on Growth and Poverty</i> (2009)	(pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur) pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, tingkat urbanisasi, distribusi pendapatan, dan tingkat investasi swasta	- Data yang digunakan merupakan data sekunder - Metode yang digunakan adalah regresi data panel	tingkat kemiskinan, infrastruktur membantu mengurangi kemiskinan secara tidak langsung melalui peningkatan akses ke pasar dan peluang kerja.

2.3 Kerangka Pemikiran

Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial merupakan bentuk investasi publik yang diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Hasil penelitian oleh Hamza (2024) menunjukkan bahwa belanja pemerintah di bidang-bidang tersebut secara signifikan mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan layanan dasar, meningkatkan keterampilan melalui pelatihan kejuruan, dan memberikan bantuan keuangan kepada keluarga, yang pada akhirnya mengarah pada standar hidup yang lebih baik dan pembangunan ekonomi. Selanjutnya Aguilar (2016) menyoroti bahwa demokrasi dengan tingkat pendapatan tinggi lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan dibandingkan demokrasi di negara miskin, di mana ketimpangan dan kelemahan dalam kebijakan publik sering menjadi penghambat, ia juga menyatakan bahwa kebebasan sipil memiliki dampak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan, terutama di negara-negara demokratis.



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

- H1 : Diduga pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di 28 provinsi Indonesia, wilayah barat, wilayah tengah, dan wilayah timur Indonesia tahun 2011-2023.
- H2 : Diduga pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di 28 provinsi Indonesia, wilayah barat, wilayah tengah, dan wilayah timur Indonesia tahun 2011-2023.
- H3 : Diduga pengeluaran pemerintah bidang perlindungan sosial berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di 28 provinsi Indonesia, wilayah barat, wilayah tengah, dan wilayah timur Indonesia tahun 2011-2023.
- H4 : Diduga kebebasan sipil berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di 28 provinsi Indonesia, wilayah barat, wilayah tengah, dan wilayah timur Indonesia tahun 2011-2023.

H5 : Diduga hak-hak politik berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di 28 provinsi Indonesia, wilayah barat, wilayah tengah, dan wilayah timur Indonesia tahun 2011-2023.

H6 : Diduga lembaga demokrasi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di 28 provinsi Indonesia, wilayah barat, wilayah tengah, dan wilayah timur Indonesia tahun 2011-2023.

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dalam bentuk data panel. Terdapat enam variabel independen yang dianalisis, meliputi belanja pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, serta indikator-indikator demokrasi seperti kebebasan sipil, hak-hak politik, dan keberadaan lembaga demokratis. Seluruh data yang digunakan dalam studi ini diperoleh dari sumber resmi, yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Tabel 2. Deskripsi Data

Variabel	Simbol	Satuan Pengukuran	Sumber Data
Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan	EDU	Persen (% terhadap PDRB)	DJPk (Diolah)
Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan	HLT	Persen (% terhadap PDRB)	DJPk (Diolah)
Pengeluaran pemerintah bidang perlindungan sosial	SP	Persen (% terhadap PDRB)	DJPk (Diolah)
Kebebasan sipil	KS	Indeks	BPS
Hak-hak politik	HP	Indeks	BPS
Lembaga demokrasi	LD	Indeks	BPS
Kemiskinan	POV	Persen	BPS

Sumber: BPS dan DJPK Kementerian Keuangan, 2025

3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini mencakup 28 provinsi di Indonesia, antara lain: Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, dan Maluku Utara. Data yang dianalisis mencakup periode 2011 hingga 2023 dengan fokus pada variabel-variabel seperti pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, serta dimensi demokrasi yang meliputi kebebasan sipil, hak-hak politik, dan keberadaan institusi demokratis. Dalam penelitian ini, terdapat 10 provinsi yang dikecualikan dari analisis.

Lima provinsi tidak disertakan karena memiliki status sebagai daerah khusus, yaitu Aceh, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Papua, dan Papua Barat. Karakteristik daerah khusus tersebut, baik dalam aspek tata kelola pemerintahan, kerangka peraturan, maupun struktur sosial-ekonomi, memiliki perbedaan mendasar dibandingkan provinsi lainnya, sehingga berpotensi menimbulkan bias dalam perbandingan data lintas daerah. Sementara itu, lima provinsi lainnya, yaitu Kalimantan Utara, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya, dikecualikan karena merupakan provinsi yang baru dibentuk dalam kurun waktu yang relatif dekat. Keterbatasan ketersediaan data yang lengkap dan konsisten sejak awal periode penelitian (2011) menjadi alasan utama tidak dimasukkannya provinsi-provinsi tersebut ke dalam analisis. Selain itu, penelitian ini juga membagi wilayah Indonesia ke dalam tiga kelompok besar sesuai dengan pembagian wilayah waktu berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1987, yaitu wilayah barat, wilayah tengah, dan wilayah timur. Pembagian ini digunakan untuk mengidentifikasi potensi perbedaan hubungan antarvariabel di setiap wilayah.

3.3 Definisi Operasional

Variabel penelitian merupakan unsur yang secara sengaja ditentukan oleh peneliti sebagai fokus pengamatan untuk memperoleh data yang relevan, sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan yang logis. Secara teoritis, variabel dapat dipahami sebagai atribut atau ciri khas yang dimiliki oleh individu maupun objek, yang menunjukkan adanya variasi atau perbedaan antara satu dengan yang lain. Dalam studi ini, sejumlah variabel dianalisis untuk merepresentasikan berbagai aspek yang menjadi perhatian utama dalam penelitian.

3.3.1 Variabel Terikat (dependent variabel) (Y)

Variabel terikat dalam suatu penelitian merupakan variabel yang diamati dan diukur untuk menilai dampak yang ditimbulkan oleh variabel bebas. Perubahan pada variabel ini baik berupa peningkatan, penurunan, kemunculan, maupun penghilangan menggambarkan sejauh mana pengaruh variabel independen bekerja. Dalam penelitian ini, variabel terikat yang dianalisis adalah tingkat kemiskinan selama kurun waktu 2011 hingga 2023. Indikator kemiskinan diukur berdasarkan persentase jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan pada 28 provinsi di Indonesia, dan disajikan dalam bentuk satuan persentase (%).

3.3.2 Variabel Bebas (independent variabel) (X)

Variabel bebas adalah variabel yang perubahannya diasumsikan dapat memengaruhi atau memberikan dampak terhadap variabel lain dalam suatu penelitian. Dengan kata lain, variabel ini berfungsi untuk mengetahui sejauh mana kontribusinya terhadap variabel yang diamati. Dalam studi ini, variabel independen mencakup alokasi pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, serta indikator demokrasi yang meliputi kebebasan sipil, hak-hak politik, dan keberadaan lembaga demokratis. Seluruh variabel tersebut dianalisis sepanjang periode 2011 hingga 2023.

1. Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2018 mengenai klasifikasi anggaran, belanja pemerintah di sektor pendidikan

mencakup pendanaan berbagai program pendidikan. Cakupan ini meliputi layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah, pendidikan nonformal dan informal, pendidikan tinggi, pendidikan kedinasan, serta pendidikan keagamaan. Selain itu, termasuk pula dukungan terhadap bantuan pendidikan, kegiatan riset dan pengembangan di bidang pendidikan dan kebudayaan, pembinaan kepemudaan dan olahraga, pelestarian serta pengembangan budaya, dan bentuk pendidikan lainnya.

Dalam penelitian ini, variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan (X1) dihitung berdasarkan data tahunan selama periode 2011 hingga 2023 di 28 provinsi di Indonesia. Nilai pengeluaran dinyatakan dalam bentuk persentase terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang diperoleh dengan membagi total anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan nilai PDRB riil masing-masing provinsi berdasarkan tahun dasar 2010 (Mongan, 2019).

2. Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2018 tentang klasifikasi anggaran, pengeluaran pemerintah dalam sektor kesehatan mencakup pendanaan untuk berbagai program kesehatan. Cakupan program tersebut meliputi penyediaan obat-obatan dan peralatan medis, layanan kesehatan perseorangan, pelayanan kesehatan masyarakat, program kependudukan dan keluarga berencana, penelitian serta pengembangan di bidang kesehatan, dan program-program lain yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat.

Dalam studi ini, variabel pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan (X2) dihitung secara tahunan untuk 28 provinsi di Indonesia selama periode 2011 hingga 2023. Nilai pengeluaran dinyatakan dalam bentuk persentase terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang dihitung dengan membagi total anggaran sektor kesehatan yang dialokasikan melalui APBD dengan nilai PDRB riil masing-masing provinsi berdasarkan tahun dasar 2010 (Mongan, 2019).

3. Pengeluaran Pemerintah Bidang Perlindungan Sosial

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2018 tentang klasifikasi anggaran, pengeluaran pemerintah dalam bidang perlindungan sosial mencakup pembiayaan berbagai program yang dirancang untuk memberikan layanan dan perlindungan kepada kelompok rentan. Program-program ini antara lain mencakup bantuan bagi individu yang sakit dan penyandang disabilitas, lanjut usia, keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan, serta pejuang. Selain itu, alokasi anggaran juga ditujukan untuk layanan sosial bagi anak dan keluarga, pemberdayaan perempuan, kegiatan penyuluhan dan bimbingan sosial, bantuan perumahan, program jaminan dan bantuan sosial, serta kegiatan riset dan pengembangan yang berkaitan dengan perlindungan sosial.

Dalam penelitian ini, pengeluaran pemerintah untuk sektor perlindungan sosial (X3) dihitung setiap tahun selama periode 2011 hingga 2023 di 28 provinsi di Indonesia. Pengukuran dilakukan dalam bentuk persentase terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yaitu dengan membagi total belanja pemerintah daerah untuk perlindungan sosial melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan nilai PDRB riil tahun dasar 2010 pada masing-masing provinsi (World Bank, 2023).

4. Kebebasan Sipil

Kebebasan sipil merujuk pada hak-hak dasar individu maupun kelompok warga negara untuk mengekspresikan pendapat, meyakini suatu ajaran atau keyakinan, serta membentuk dan bergabung dalam organisasi atau perkumpulan. Selain itu, konsep ini mencakup perlindungan dari tindakan diskriminatif atau pembatasan yang dilakukan oleh sesama warga, otoritas negara, maupun kelompok masyarakat lainnya (BPS, 2013). Dalam penelitian ini, kebebasan sipil digunakan sebagai salah satu variabel yang diukur setiap tahun selama periode 2011 hingga 2023, mencakup 28 provinsi di Indonesia. Nilai variabel ini dinyatakan dalam bentuk indeks.

5. Hak – Hak Politik

Hak politik merupakan hak fundamental setiap warga negara yang mencakup kebebasan untuk memberikan suara dalam pemilu serta kesempatan untuk

mencalonkan diri dalam jabatan publik secara terbuka dan adil. Selain itu, partisipasi politik dalam proses pengambilan keputusan mengacu pada keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai aspek kegiatan politik, mulai dari perencanaan hingga pengawasan kebijakan (BPS, 2013). Dalam studi ini, indikator hak politik diukur setiap tahun selama periode 2011 hingga 2023 pada 28 provinsi di Indonesia, dan dinyatakan dalam bentuk indeks.

6. Lembaga Demokrasi

Lembaga demokrasi merujuk pada institusi-institusi negara yang dibentuk untuk memastikan berlangsungnya sistem pemerintahan yang demokratis. Lembaga ini beroperasi baik pada level suprastruktur seperti lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif maupun pada level infrastruktur, yang mencakup pemilihan umum, partai politik, media, serta kelompok-kelompok kepentingan (BPS, 2013). Dalam penelitian ini, variabel lembaga demokrasi dianalisis secara tahunan selama periode 2011 hingga 2023 di 28 provinsi di Indonesia, dan diukur menggunakan satuan indeks.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* sebagai metode pengumpulan data, yakni pemilihan sampel secara sengaja berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari laman resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Unit analisis dalam studi ini mencakup 28 provinsi di Indonesia. Sementara itu, lima provinsi lainnya yaitu DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Aceh, Papua, dan Papua Barat tidak disertakan karena memiliki status sebagai daerah khusus atau istimewa yang berbeda secara administratif, fiskal, serta kondisi sosial-politik dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia.

3.5 Metode Analisis Data

Menurut Sugiyono (2011), analisis data merupakan proses sistematis yang digunakan untuk mengolah data yang telah dikumpulkan dalam suatu penelitian, dengan tujuan memperoleh informasi yang relevan guna menjawab pertanyaan penelitian dan

menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam penelitian ini, pendekatan kuantitatif digunakan dengan memanfaatkan data panel, yaitu gabungan antara data *cross-section* dan *time series*. Data *cross-section* mencerminkan informasi yang diperoleh dari berbagai unit observasi, seperti individu, wilayah, atau institusi, pada satu titik waktu tertentu. Sebaliknya, data *time series* merupakan rangkaian data yang dikumpulkan dari satu unit observasi dalam periode waktu yang berurutan.

Sebagaimana dijelaskan oleh Widarjono (2018), terdapat tiga metode utama yang umum digunakan dalam estimasi regresi data panel, yaitu Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM). Penelitian ini mengadopsi teknik regresi linear berganda untuk menganalisis pengaruh simultan beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen. Pendekatan ini bermanfaat dalam menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran. Proses analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak statistik Stata. Secara umum, bentuk model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X1_{it} + \beta_2 X2_{it} + \beta_3 X3_{it} + \beta_4 X4_{it} + \beta_5 X5_{it} + \beta_6 X6_{it} + \varepsilon_{it}$$

Sehingga model persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$POV_{it} = \beta_0 + \beta_1 LNEDU_{it} + \beta_2 HLT_{it} + \beta_3 SP_{it} + \beta_4 KS_{it} + \beta_5 HHP_{it} + \beta_6 LD_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

POV	: Tingkat kemiskinan (persen dari populasi) di provinsi i pada tahun t
EDU	: Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan (persen dari PDRB)
HLT	: Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan (persen dari PDRB)
SP	: Pengeluaran pemerintah bidang perlindungan sosial (persen dari PDRB)
KS	: Kebebasan sipil (indeks)
HP	: Hak – hak politik (indeks)
LD	: Lembaga demokrasi (indeks)

i	: Jumlah data <i>cross section</i>
t	: Jumlah data <i>time series</i>
β_0	: Konstanta
$\beta_1 - \beta_7$	: Koefisien regresi untuk masing-masing variabel independen
e	: <i>Error term</i>

3.6 Prosedur Analisis Data

3.6.1 Regresi Data Panel

Menurut Wibisono (2005), terdapat beberapa keunggulan dalam penggunaan regresi data panel yang membuat metode ini menjadi salah satu pendekatan analisis yang unggul dalam studi ekonomi dan sosial. Keunggulan-keunggulan tersebut meliputi:

1. Kemampuan membedakan karakteristik individu secara spesifik. Data panel memungkinkan adanya variabel yang bersifat unik pada masing-masing unit observasi, sehingga mampu menangkap perbedaan karakteristik antar individu secara lebih akurat.
2. Pengendalian terhadap heterogenitas. Dengan mengakomodasi perbedaan antar unit, data panel dapat digunakan untuk membangun dan menguji model perilaku yang lebih kompleks dibandingkan model regresi biasa.
3. Cocok untuk studi dinamika. Karena data panel terdiri dari kombinasi observasi *cross-section* dan *time series*, metode ini sangat tepat digunakan dalam penelitian yang mempelajari proses penyesuaian dinamis dalam jangka waktu tertentu.
4. Ketersediaan informasi yang lebih kaya. Banyaknya jumlah observasi dalam data panel memberikan informasi yang lebih bervariasi, sehingga membantu mengurangi risiko multikolinearitas antar variabel, meningkatkan derajat kebebasan, dan menghasilkan estimasi yang lebih efisien.
5. Kemampuan dalam menganalisis model perilaku yang kompleks. Regresi data panel mendukung eksplorasi terhadap struktur perilaku ekonomi dan sosial yang lebih rumit, terutama dalam konteks interaksi variabel yang bersifat dinamis.

6. Mengurangi potensi bias dari agregasi data. Penggunaan data panel dapat meminimalkan kesalahan estimasi yang mungkin muncul akibat penggabungan data individu menjadi data agregat.

Lebih lanjut, analisis regresi data panel merupakan pendekatan statistik yang bertujuan untuk mengamati hubungan antara satu variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen dalam struktur data panel. Menurut Widarjono (2018), terdapat tiga pendekatan utama dalam estimasi regresi data panel, yaitu Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM), yang masing-masing memiliki karakteristik dan asumsi tersendiri dalam penggunaannya.

1. *Common Effect Model (CEM)*

Common Effect Model (CEM) merupakan salah satu pendekatan dalam analisis regresi data panel yang menyatukan seluruh data *time series* dan *cross section* tanpa membedakan karakteristik individu maupun waktu. Model ini menggunakan metode estimasi Ordinary Least Squares (OLS) untuk menghitung parameter regresinya (Widarjono, 2018). Metode OLS sendiri dikenal luas sebagai teknik dasar dalam analisis regresi linear karena kemampuannya memberikan estimasi yang efisien dalam kondisi tertentu. Namun, pendekatan CEM mengasumsikan bahwa seluruh unit observasi memiliki perilaku yang seragam sepanjang waktu, sehingga tidak mempertimbangkan adanya variabilitas antar individu maupun perubahan antar periode.

2. *Fixed Effect Model (FEM)*

Fixed Effect Model (FEM) merupakan metode estimasi dalam analisis data panel yang digunakan untuk menangkap adanya perbedaan nilai intersep antar unit observasi, dengan cara memasukkan variabel dummy ke dalam model (Widarjono, 2018). Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa meskipun terdapat variasi antar individu, nilai intersep tersebut bersifat konstan sepanjang waktu (*time-invariant*). Sementara itu, kemiringan garis regresi (*slope*) diasumsikan tetap, baik antar individu maupun antar periode. Dengan demikian, model ini memungkinkan pengendalian terhadap karakteristik khas setiap unit yang tidak berubah dari waktu

ke waktu. Metode ini juga sering disebut sebagai Least Square Dummy Variable (LSDV) atau dikenal pula dengan istilah Covariance Model.

3. *Random Effect Model (REM)*

Berbeda dengan Fixed Effect Model yang mengakomodasi perbedaan karakteristik individu maupun waktu melalui variasi pada nilai intersep, Random Effect Model (REM) justru mengasumsikan bahwa variasi tersebut tercermin dalam komponen galat atau error model (Widarjono, 2018). Dalam pendekatan ini, error terdiri dari dua bagian utama, yaitu komponen individual dan komponen waktu, yang kemudian digabungkan membentuk error keseluruhan. Oleh karena itu, REM memperhitungkan adanya kemungkinan korelasi dalam error baik sepanjang dimensi waktu (*time series*) maupun antar unit observasi (*cross-section*). Model ini sering dikenal pula dengan istilah Error Component Model (ECM) atau menggunakan metode estimasi Generalized Least Squares (GLS).

3.6.2 **Pemilihan Model Regresi Estimasi Data Panel**

Secara umum, pemilihan metode estimasi dalam analisis data panel dapat disesuaikan dengan kondisi penelitian, seperti jumlah unit observasi (misalnya provinsi, lembaga, atau entitas lainnya) serta jenis variabel yang digunakan. Namun demikian, terdapat pendekatan tertentu yang dapat digunakan untuk menentukan model estimasi yang paling tepat. Menurut Widarjono (2018), terdapat tiga jenis pengujian yang umum diterapkan untuk memilih metode estimasi panel data. Pertama, uji Chow dilakukan untuk menentukan apakah model Common Effect atau Fixed Effect yang lebih sesuai. Kedua, uji Hausman digunakan dalam membandingkan Fixed Effect dengan Random Effect guna mengetahui model yang paling efisien dan konsisten. Ketiga, uji Lagrange Multiplier (LM) digunakan untuk menilai apakah model Common Effect atau Random Effect yang lebih layak diterapkan dalam penelitian.

1. Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk menentukan model estimasi yang paling tepat antara Common Effect Model (CEM) dan Fixed Effect Model (FEM) (Widarjono, 2018), pengujian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan Redundant Fixed Effect Likelihood Ratio. Untuk menarik kesimpulan, peneliti memerhatikan nilai probabilitas (*p-value*) dari hasil uji tersebut. Adapun formulasi hipotesis yang digunakan dalam uji Chow secara umum sebagai berikut:

H_0 : *Common Effect Model*

H_a : *Fixed Effect Model*

Dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

- a. Jika *P-value* < taraf nyata (α), maka H_0 ditolak
- b. Jika *P-value* > taraf nyata (α) maka H_0 diterima

2. Uji Hausman

Pengujian ini bertujuan untuk menentukan model yang paling sesuai antara model efek tetap (Fixed Effect Model) dan model efek acak (Random Effect Model) (Widarjono, 2018). Prinsip dasar dari uji ini adalah mengevaluasi apakah terdapat korelasi antara komponen galat (error komposit) dengan satu atau lebih variabel independen dalam model regresi. Jika terdapat hubungan tersebut, maka model efek tetap lebih tepat digunakan. Hipotesis pengujiannya sebagai berikut:

H_0 = Metode *Random Effect*

H_1 = Metode *Fixed Effect*

Dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

- a. Jika *P-value* < taraf nyata (α), maka H_0 ditolak
- b. Jika *P-value* > taraf nyata (α) maka H_0 diterima

3. Uji Lagrange Multiplier

Uji Lagrange Multiplier (LM) digunakan untuk menentukan model estimasi yang lebih sesuai antara Random Effect Model (REM) dan Common Effect Model (CEM) (Widarjono, 2018). Pengujian ini dikembangkan oleh Breusch dan Pagan, dan sering disebut sebagai Breusch-Pagan LM test. Uji ini dilakukan dengan menganalisis nilai residual (galat) yang diperoleh dari model OLS untuk mengetahui

apakah adanya variansi komponen individual yang signifikan. Hipotesis pengujiannya adalah sebagai berikut:

$H_0 = \text{Common Effect Model}$

$H_1 = \text{Random Effect Model}$

Dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

- a. Probabilitas $\chi^2 < \text{taraf nyata } (\alpha)$, maka H_0 ditolak
- b. Probabilitas $\chi^2 > \text{taraf nyata } (\alpha)$ maka H_0 diterima

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

Pengujian ini bertujuan untuk mendeteksi ada tidaknya pelanggaran terhadap asumsi klasik dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian. Pengujian meliputi beberapa tahapan, yaitu uji normalitas untuk melihat distribusi residual, uji heteroskedastisitas guna menilai kesamaan varians galat, uji autokorelasi untuk mendeteksi hubungan antar residual dalam observasi berurutan, serta uji multikolinearitas yang digunakan untuk mengidentifikasi adanya hubungan yang tinggi antar variabel independen. Keempat pengujian ini penting dilakukan guna memastikan validitas dan reliabilitas hasil estimasi regresi.

1. Uji Normalitas

Pengujian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah sebaran data pada suatu variabel mengikuti pola distribusi normal. Menurut Widarjono (2018), normalitas data merupakan salah satu prasyarat dalam regresi klasik. Suatu data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai skewness berada dalam rentang -2 hingga 2, serta nilai kurtosis berada antara -3 dan 3 (Ananta et al., 2023; Dagli, 2021). Kriteria ini menjadi dasar dalam menentukan kelayakan data untuk dianalisis lebih lanjut dengan metode statistik parametrik.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan korelasi yang kuat antar variabel bebas dalam suatu model regresi. Keberadaan korelasi tinggi antar variabel independen dapat menimbulkan gangguan dalam penafsiran hasil estimasi model. Oleh karena itu, pengujian ini penting dilakukan

guna memastikan bahwa masing-masing variabel bebas memberikan kontribusi yang unik dan tidak tumpang tindih satu sama lain dalam menjelaskan variabel dependen (Widarjono, 2018):

H_0 : Tidak terjadi multikolinearitas (*Variance Inflation Factor* (VIF) < 10)

H_a : Terjadi multikolinearitas (*Variance Inflation Factor* (VIF) > 10)

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mendeteksi apakah terdapat ketidaksamaan varians dari nilai residual atau galat antar satu observasi dengan observasi lainnya dalam model regresi. Ketika varians residual tidak konstan, hal ini dapat mengganggu validitas hasil estimasi dan menyebabkan kesalahan dalam penarikan kesimpulan. Oleh karena itu, pengujian ini penting dilakukan guna memastikan bahwa model memenuhi asumsi homoskedastisitas, yakni kondisi di mana residual memiliki sebaran varians yang sama (Widarjono, 2018):

H_0 : Tidak terjadi heteroskedastisitas (Nilai Prob $> \alpha$ (0,05))

H_a : Terjadi heteroskedastisitas (Nilai Prob $< \alpha$ (0,05))

4. Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara nilai residual dalam model regresi dari satu periode ke periode lainnya. Kehadiran korelasi antar residual mengindikasikan adanya autokorelasi, yang dapat mengganggu validitas hasil estimasi model. Untuk mengidentifikasi permasalahan ini, digunakan uji Durbin-Watson, yang memberikan ukuran statistik guna menilai apakah residual memiliki pola keterkaitan atau tidak (S. Santoso, 2019) :

- a. Nilai DW di bawah -2, artinya terdapat autokorelasi positif.
- b. Nilai DW di antara -2 sampai +2, artinya tidak ada autokorelasi.
- c. Nilai DW di atas +2, artinya ada autokorelasi negatif.

3.6.4 Pengujian Hipotesis

3.6.4.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T)

Uji t-statistik digunakan untuk mengevaluasi seberapa besar pengaruh masing-

masing variabel bebas terhadap variabel terikat secara individual. Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai t-hitung dengan nilai t-tabel pada tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$), guna menentukan apakah suatu variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Widarjono, 2018). Adapun hipotesis yang digunakan dalam uji ini dirumuskan sebagai berikut:

a. Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan (EDU)

$H_{01}: \beta_1 = 0$, EDU tidak berpengaruh terhadap POV

$H_{a1}: \beta_1 < 0$, EDU berpengaruh negatif terhadap POV

b. Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan (HLT)

$H_{02}: \beta_2 = 0$, HLT tidak berpengaruh terhadap POV

$H_{a2}: \beta_2 < 0$, HLT berpengaruh negatif terhadap POV

c. Pengeluaran Pemerintah Bidang Perlindungan Sosial (SP)

$H_{03}: \beta_3 = 0$, SP tidak berpengaruh terhadap POV

$H_{a3}: \beta_3 < 0$, SP berpengaruh negatif terhadap POV

d. Aspek Kebebasan Sipil (KS)

$H_{05}: \beta_5 = 0$, KS tidak berpengaruh terhadap POV

$H_{a5}: \beta_5 < 0$, KS berpengaruh negatif terhadap POV

e. Aspek Hak-Hak Politik (HP)

$H_{06}: \beta_6 = 0$, HP tidak berpengaruh terhadap POV

$H_{a6}: \beta_6 < 0$, HP berpengaruh negatif terhadap POV

f. Aspek Lembaga Demokrasi (LD)

$H_{07}: \beta_7 = 0$, LD tidak berpengaruh terhadap POV

$H_{a7}: \beta_7 < 0$, LD berpengaruh negatif terhadap POV

Kriteria pengujiannya adalah:

- a. Jika nilai $T_{hitung} > \text{nilai } T_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan menerima H_a , artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat.

- b. Jika nilai $T_{hitung} < \text{nilai } T_{tabel}$ maka H_0 diterima dan menolak H_a , artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat.

3.6.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Pengujian F-statistik digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Widarjono, 2018). Dengan kata lain, uji ini bertujuan untuk menguji kelayakan model regresi secara keseluruhan. Adapun hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah sebagai berikut:

H_0 : $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = \beta_6 = \beta_7 = 0$, artinya secara bersama-sama variabel bebas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.

H_a : $\beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq \beta_5 \neq \beta_6 \neq \beta_7 \neq 0$, artinya setidaknya satu variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Dasar pengambilan keputusan pengujian hipotesis ini adalah:

- a. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau probabilitas $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya setidaknya terdapat satu variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.
- b. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau probabilitas $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat

3.6.4.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi variabel independen dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen. Menurut Widarjono (2018), R^2 merupakan salah satu indikator penting dalam analisis regresi linear karena dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana model yang diestimasi mampu menjelaskan fenomena yang diteliti. Nilai koefisien ini berada dalam rentang antara 0 hingga 1. Semakin tinggi nilai R^2 (mendekati 1), maka semakin kuat hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, yang berarti model

memiliki kemampuan penjelasan yang baik. Sebaliknya, jika nilai R^2 mendekati 0, maka variabel independen hanya sedikit menjelaskan variasi pada variabel dependen. Dengan demikian, nilai R^2 menggambarkan tingkat kecocokan model regresi dalam menjelaskan fenomena yang diamati.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, pengeluaran pemerintah bidang perlindungan sosial, kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi atas pengaruhnya terhadap tingkat kemiskinan di 28 provinsi di Indonesia pada tahun 2011 hingga 2023. Adapun kesimpulan yang didapatkan adalah sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan menunjukkan hubungan negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2011-2023. Dengan meningkatnya akses dan kualitas pendidikan, individu memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan untuk memasuki pasar kerja yang lebih produktif dan berdaya saing. Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan bernilai negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2011-2023. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berkontribusi dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Pengeluaran pemerintah bidang perlindungan sosial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan 28 provinsi di Indonesia tahun 2011-2023. Temuan ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk perlindungan sosial tidak dapat mempengaruhi penurunan tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia.
- 2) Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan menunjukkan hubungan negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di wilayah barat, wilayah tengah, dan wilayah timur Indonesia. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan belanja

pendidikan di wilayah barat, tengah dan timur mampu memberikan dampak nyata dalam menurunkan tingkat kemiskinan sepanjang periode 2011–2023.

Pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan menunjukkan hubungan negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di wilayah barat Indonesia. Sementara di wilayah tengah, hubungan yang ditunjukkan tetap negatif namun tidak signifikan, mengindikasikan bahwa dampak belanja kesehatan terhadap penurunan kemiskinan belum cukup kuat atau merata. Adapun di wilayah timur, pengeluaran kesehatan justru menunjukkan hubungan positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan belanja kesehatan di wilayah timur belum mampu menjangkau masyarakat miskin secara efektif, akibat tantangan geografis, keterbatasan infrastruktur, dan rendahnya kualitas layanan kesehatan.

Pengeluaran pemerintah di bidang perlindungan sosial menunjukkan hubungan yang tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di wilayah barat, dan timur Indonesia, menunjukkan bahwa belanja perlindungan sosial belum menjangkau masyarakat miskin secara efektif, akibat tantangan geografis dan lemahnya kapasitas distribusi bantuan. Sementara di wilayah tengah, hubungan negatif namun tidak signifikan mengindikasikan bahwa alokasi anggaran belum berdampak nyata, akibat kelemahan pelaksanaan dan ketidaktepatan sasaran.

- 3) Kebebasan sipil tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan 28 provinsi di Indonesia selama tahun 2011-2023. Temuan ini menunjukkan bahwa kebebasan sipil tidak dapat mempengaruhi penurunan tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia. Hak – hak politik menunjukkan hubungan negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2011-2023. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin terbukanya ruang bagi masyarakat untuk menikmati hak-hak politiknya yang mencakup hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu, serta partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap kebijakan publik akan berpengaruh positif terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Kualitas lembaga demokrasi menunjukkan hubungan negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2011-2023. Peran DPRD

sebagai lembaga legislatif daerah berfungsi sebagai pengawas terhadap eksekutif dan memiliki kekuatan untuk mendorong anggaran yang berpihak pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Partai politik yang menjalankan fungsinya dengan baik dapat menjadi saluran aspirasi masyarakat miskin dan mendorong agenda keadilan sosial.

- 4) Kebebasan sipil tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di wilayah barat Indonesia selama 2011–2023, menunjukkan bahwa peningkatan kebebasan sipil belum mampu menurunkan kemiskinan. Di wilayah tengah dan timur, hubungan tetap negatif namun tidak signifikan, mengindikasikan bahwa meskipun ada kecenderungan penurunan kemiskinan, dampaknya belum nyata akibat belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan.

Hak-hak politik menunjukkan hubungan negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia selama 2011–2023. Artinya, semakin besar ruang partisipasi politik masyarakat, semakin efektif penanggulangan kemiskinan.

Kualitas lembaga demokrasi menunjukkan hubungan negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di wilayah barat Indonesia selama 2011–2023. Di wilayah tengah, hubungan tetap negatif namun tidak signifikan, mengindikasikan bahwa perbaikan lembaga demokrasi belum cukup kuat untuk menurunkan kemiskinan. Sementara di wilayah timur, hubungan tidak signifikan, menunjukkan bahwa peningkatan kualitas lembaga demokrasi belum berdampak nyata terhadap penurunan kemiskinan.

- 5) Di antara variabel bebas yang digunakan yaitu pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, pengeluaran pemerintah bidang perlindungan sosial, kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi setidaknya satu dari ke tujuh variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di 28 provinsi di Indonesia tahun 2011-2023, dengan asumsi faktor-faktor lain di anggap tetap (*ceteris paribus*).

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dari pengolahan data dan pembahasan yang telah di lakukan meskipun masih terdapat banyak kekurangan di harapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya dan pihak-pihak terkait yang membutuhkan. Saran yang dapat di berikan antara lain:

- 1) Pemerintah perlu mempertahankan dan meningkatkan alokasi anggaran pendidikan, terutama untuk memperluas akses dan kualitas pendidikan dasar dan menengah di daerah tertinggal. Program seperti BOS, PIP, dan beasiswa bagi siswa miskin harus diperluas dengan ketepatan sasaran. Selain itu, pengembangan pendidikan vokasi dan pelatihan kerja yang sesuai kebutuhan industri lokal, serta kolaborasi dengan dunia usaha dalam penyediaan magang dan sertifikasi, penting untuk meningkatkan daya saing dan penyerapan lulusan di pasar kerja.
- 2) Pemerintah perlu mengoptimalkan fungsi alokasi anggaran dengan meningkatkan belanja kesehatan yang tepat sasaran, khususnya di daerah miskin. Anggaran tersebut perlu difokuskan pada program pro-masyarakat miskin seperti JKN-PBI, layanan kesehatan gratis, dan perbaikan gizi ibu-anak. Selain itu, integrasi dengan program penanggulangan kemiskinan lainnya, penguatan pengawasan penggunaan anggaran, serta investasi pada infrastruktur dan tenaga kesehatan di daerah perlu terus dilakukan agar dampaknya lebih efektif dan berkelanjutan.
- 3) Pemerintah perlu meningkatkan proporsi anggaran perlindungan sosial, terutama di provinsi dengan kemiskinan tinggi, serta mengevaluasi efektivitas program seperti PKH dan BPNT yang masih menghadapi masalah ketidaktepatan sasaran dan distribusi. Optimalisasi DTKS dan digitalisasi sistem secara transparan dan terintegrasi antar-instansi sangat penting untuk meningkatkan akurasi data penerima. Dan bagi pemerintah daerah untuk tidak hanya mengandalkan program nasional, tetapi juga mengembangkan program perlindungan sosial berbasis lokal yang sesuai dengan kondisi sosial ekonomi wilayah masing-masing, seperti bantuan saat musim paceklik atau subsidi bagi petani rentan. Selain itu, pengentasan korupsi

dalam penyaluran bantuan sosial perlu diperkuat melalui pengawasan yang ketat dan sistem pelaporan yang terbuka.

- 4) Pemerintah perlu melakukan pengecekan ulang kembali terhadap pasal-pasal dalam UU ITE yang multitafsir, serta menyusun panduan implementasi yang jelas agar tidak disalahgunakan. Kebebasan sipil, termasuk kebebasan berpendapat, perlu dijamin sebagai bagian dari ruang publik yang sehat, yang memungkinkan masyarakat menyuarakan keluhan dan kebutuhan mereka, termasuk terkait masalah kemiskinan. Selain itu, pemerintah dan lembaga legislatif harus mendorong literasi hukum dan digital agar masyarakat dapat menggunakan hak sipilnya dengan aman dan bertanggung jawab.
- 5) Pemerintah perlu meningkatkan pendidikan politik dan partisipasi warga, khususnya di kalangan masyarakat miskin dan marjinal. Program seperti forum warga, musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), dan penguatan peran kelompok masyarakat sipil harus dihidupkan kembali agar partisipasi politik tidak hanya simbolis tetapi juga substantif. Pemilu juga harus dijaga agar berlangsung bebas dan adil, dengan memastikan akses informasi yang merata dan netralitas penyelenggara pemilu.
- 6) Perlu adanya penguatan fungsi pengawasan dan anggaran oleh DPR dan DPRD untuk memastikan belanja daerah difokuskan pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Partai politik harus didorong untuk menjadi saluran aspirasi nyata masyarakat miskin, bukan hanya kendaraan politik elit. Pemerintah juga perlu menjaga independensi lembaga peradilan, agar mampu menegakkan keadilan sosial secara objektif, terutama dalam konflik yang melibatkan hak-hak masyarakat kecil atas tanah, akses layanan publik, dan perlindungan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhana, I. N. (2024). *Pendidikan sebagai Landasan Utama Memutus Siklus kemiskinan antar-generasi*. Kumparan.Com.
- Adnan, G., & Amri, K. (2021). Do gender empowerment and democracy reduce poverty rate? A cross-provinces evidence from western indonesia. *Economics and Sociology*, 14(3), 54–71
- Adon, M. J., Jeraman, G. T., & Andrianto, Y. (2023). Kontribusi Teori Kemiskinan Sebagai Deprivasi Kapabilitas Dari Amartya Sen Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Miskin. *Masyarakat Madani: Jurnal Kajian Islam Dan Pengembangan Masyarakat*, 8(1), 1.
- Aguilar, K. M. M. (2016). The Impact of Democracy on Poverty Levels. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 5(3), 491–498.
- Agungnoe. (2021). *Pengamat UGM: Penyaluran Bansos Jangan Tumpang Tindih*. Universitas Gadjah Mada.
- Ananta, P., Kamal, M. E. bin M., & Mohamed, N. (2023). Public Spending, Corruption, and Human Development: Empirical Evidence in Middle-Income Countries. *Proceedings of the International Conference in Technology, Humanities and Management (ICTHM 2023)*, 12-13 June, 2023, Istanbul, Turkey, 131, 561–579. <https://doi.org/10.15405/epsbs.2023.11.48>
- Anggraeni, P. A., & Uzaimah, L. (2024). *Tinjauan Terhadap Kasus Korupsi Bantuan Sosial Dan Dampak Bagi Kesejahteraan Masyarakat Priska Aulia Anggraeni 1 , Lutfi Uzaimah 2 Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang*. 10(24), 396–404.
- Arif, A. (2025). *104 Perusahaan Berada di Balik 20 Persen Konflik Lingkungan dan Sosial di Dunia*. Kompas.Id.
- Arifin, H. (2016). *Analisis Efektivitas Upaya Demokratisasi Terhadap Penanggulangan Kemiskinan*. 1–23.
- Arsyad, L. (1988). *Ekonomi pembangunan*. Bag. Penerb. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi-YKPN.
- Azzahra, Q. (2024). *Realitas Kemiskinan Indonesia, Tersebab Kebijakan atau Populasi*. The Prakarsa.

- Baldacci, E., Clements, B., Cui, Q., & Gupta, S. (2005). Education And Development- What Does It Take to Help the Poor? Spending on education and health can boost human capital in poor countries and help them reach the MDGs, but only if governments are. *Finance and Development-English Edition*, 42(2), 20–23.
- Bambang Irawan, B. (2007). 312-1184-1-Sm. *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 5(0854), 54–64.
- Bandiyono, A. (2018). Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Berdasarkan Fungsi Terhadap Peningkatan Ipm Dan Pengentasan Kemiskinan (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh). *Info Artha*, 2(1), 11–28.
- Barrientos, A. (2011). Social protection and poverty. *International Journal of Social Welfare*, 20(3).
- Bealey, F., & Johnson, A. G. (1999). *The Blackwell dictionary of political science: User*.
- Bollen, K. (1993). Liberal democracy: Validity and method factors in cross-national measures. *American Journal of Political Science*, 1207–1230.
- BPS. (2013). *Indeks Demokrasi Indonesia 2013*. 1–21.
- BPS. (2025). *Memahami Perbedaan Angka Kemiskinan versi Bank Dunia dan BPS*. Badan Pusat Statistik.
- Craigwell, R., Bynoe, D., & Lowe, S. (2012). The effectiveness of government expenditure on education and health care in the Caribbean. *International Journal of Development Issues*, 11(1), 4–18.
- Dagli, R. (2021). *Skewness and Kurtosis – Positively Skewed and Negatively Skewed Distributions in Statistics Explained*. Freecodecamp.
- Dahl, R. A. (2008). *Polyarchy: Participation and opposition*. Yale university press.
- Damai, A., & Aprianti, Y. (2024). The impact of fiscal policy on the underprivileged population in Indonesia. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 12(3), 321–342.
- Dumairy. (2009). *Perekonomian Indonesia*. Erlangga.
- Fan, S., Hazell, P., & Thorat, S. (2000). Government spending, growth and poverty in rural India. *American Journal of Agricultural Economics*, 82(4), 1038–1051.
- Fletcher, T., & Rosenberg, T. (2024). *Is Governance Associated with Poverty Reduction Independent of Economic Growth? November*.
- Gao, Y., & Zang, L. (2022). Is democracy pro-poor? An empirical test of the Sen Hypothesis based on global evidence. *Governance*, 35(3), 847–868.
- Girsang, A. P. L., Agustina, R., Sulistyowati, N. P., Sulistyowati, R., & Nugroho, S.

- W. (2024). *Statistik Pendidikan : Volume 13, 2024*.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2012). *Dasar-Dasar Ekonometrika*, Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Hamza, A. R., Hanash, A. T., Hussein, W. K., Saleh, M. M., & Muhammad, U. M. (2024). The Role of Government Spending in Reducing Poverty in Iraq. *International Journal of Business and Management Sciences*, 4(05), 274–292.
- Harber, C. (2002). Education, democracy and poverty reduction in Africa. *Comparative Education*, 38(3), 267–276.
- Hidalgo-Hidalgo, M., & Iturbe-Ormaetxe, I. (2018). Long-run effects of public expenditure on poverty. *The Journal of Economic Inequality*, 16, 1–22.
- Hidayat, A. Y., & Azhar, Z. (2022). Analisis Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Kesehatan, Pendidikan, Dan Infrastruktur Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 4(1), 65.
- Hong, H., & Ahmed, S. (2009). Government spending on public goods: Evidence on growth and poverty. *Economic and Political Weekly*, 102–108.
- Huang, Y. (2024). The Poverty Reduction Effect of Economic Growth: How Does Chinas Economic Growth Impact the Population Size of the Urban Livings of Minimum Living Allowance? *Advances in Economics, Management and Political Sciences*, 72(1), 180–191.
- Jasmine, A., Remanu, K., Purwanto, C. S., & Fajri, N. N. (2024). *Analisis Implikasi UU ITE Terhadap Kebebasan Berekspresi di Ruang Digital: Studi Kasus Greenpeace Indonesia*. 2, 1–11.
- Jung, H.-S., & Thorbecke, E. (2003). The impact of public education expenditure on human capital, growth, and poverty in Tanzania and Zambia: a general equilibrium approach. *Journal of Policy Modeling*, 25(8), 701–725.
- Kar, B. B. (2022). Poverty and the role of institutions in Sub-Saharan African Countries. In *Interdisciplinary approaches to the future of Africa and Policy Development* (pp. 151–167). IGI Global Scientific Publishing.
- Karim, M. F. (2024). *Melacak Akar Kesejahteraan: Review Buku Why Nations Fail*. Universitas Bina Nusantara.
- Kemenkes. (2023). *Profil Kesehatan Indonesia 2023*.
- Kemensetneg. (2024). *Targetkan Penurunan Angka Kemiskinan 7,5 persen di 2024, Wapres Minta K/L Terkait Optimalkan Program dan Anggaran*. Kementerian Sekretariat Negara RI.
- Komarudin, M., & Oak, M. (2020). Public Health Spending, Governance Quality and Poverty Alleviation. *Economics and Finance in Indonesia*, 66(2), 157.

- Kominfo. (2025). *Hati-Hati, Tiga Penyakit Masih Ancam Kesehatan Masyarakat Malut*. Malutprov.Go.Id.
- Kuncoro, M. (1997). *Ekonomi pembangunan: teori, masalah, dan kebijakan*. Unit Penerbit dan Percetakan, Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Laksono, M. Y. (2025). *Satu Dekade Terakhir, 12 Juta Hektar Tanah Masyarakat Adat Dirampas*. Kompas.Com.
- Lewis, O. (1959). *Five Families: Mexican Case Studies in the Culture of Poverty*. Basic Books.
- Lewis, O. (1998). The culture of poverty. *Society*, 35(2), 7–9.
- Liu, W., Li, J., & Zhao, R. (2020). Rural public expenditure and poverty alleviation in China: A spatial econometric analysis. *Journal of Agricultural Science*, 12(6), 46.
- Mangkoesoebroto, G. (2008). *Ekonomi Publik Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Bpfe.
- Mantalean, V., & Movanita, A. N. K. (2023). *Konflik Agraria Era Jokowi, KPA: 29 Warga Tewas Perjuangkan Hak atas Tanah*. Kompas.Com.
- Melati, A. M., Sudrajat, Burhany, D. I., Rasyid, M. R. H., & Triani, M. (2024). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan, Pendidikan dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(2), 163–171.
- Mellyndawati, V., & Yuhertiana, I. (2023). Government Expenditure and Poverty in East Java Province. *International Journal of Current Science Research and Review*, 6(08).
- Mills, Anne; Gilson, L. (1988). Health Economics for Developing Countries : A Survival Kit. *Health (San Francisco)*, 17, 135.
- Misdawita, & Sari, A. A. P. (2018). Analisis Dampak Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Pendidikan, Kesehatan, Dan Pengeluaran Subsidi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 4, 147–161.
- Molo, M. (2016). Kemiskinan: Konsep, Pengukuran Dan Kebijakan*. *Populasi*, 6(2).
- Mongan, J. J. S. (2019). Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 4(2), 163–176.
- Muhammad. (2019). *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Unimal Press.
- Muslim, R. (2025). *Gubernur Luncurkan Program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas Provinsi Maluku Utara*. Dinas Kesehatan Maluku Utara.

- Mustaqimah, K., Hartoyo, S., & Fahmi, I. (2017). Peran belanja modal pemerintah dan investasi pembangunan manusia dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 6(2), 1–15.
- Novanto. (2024). *Pengaruh Perkembangan Demokrasi dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. 4, 41–53.
- Novrizaldi. (2023). *Menko PMK: Tangani Kemiskinan Ekstrem Dapat Menyelesaikan Stunting Juga*. KemenkoPMK.
- Novrizaldi. (2024). *Pemerintah Kejar Target Penurunan Angka Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia*. KemenkoPMK.
- Nugroho, A. A., Hermawati, M., Sandiah, R. S., Shafiq, A., Feby, A., & Siregar, T. R. K. (2024). Implementasi Undang-Undang ITE Dalam Menjamin Kebebasan Berpendapat di Dunia Maya. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(11), 203–207.
- Nurias, N., Johari, S. M., Muljarijadi, B., & Wardhana, A. (2023). Reducing the provincial poverty rate in Indonesia: The impact of local government expenditure. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 24(2), 297–315.
- Olopade, B. C., Okodua, H., Oladosun, M., & Asaleye, A. J. (2019). Human capital and poverty reduction in OPEC member-countries. *Heliyon*, 5(8), e02279.
- Ombudsman. (2024). *Problematika Bantuan Sosial dan DTKS*. Ombudsman Republik Indonesia.
- Piri, I. E. (2024). *Masih Berkutat pada Data Penerima*. Tempo.
- Popova, D. (2023). Impact of equity in social protection spending on income poverty and inequality. *Social Indicators Research*, 169(1), 697–721.
- Purba, S. F., & Hariyadi, H. (2023). Relasi Bauran Aspek Demokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 14(2), 165–188.
- Purmiyati, A., Hassan, A. A. G., Sari, D. W., Romadhoni, V., Anggela, N., & Rahmadani, L. (2023). The Effect of Political and Economic Dimensions on Poverty in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 15(2), 18.
- Puspita, A. R. (2024). *Dampak Korupsi Pemerintah Dalam Pengelolaan Bantuan Sosial Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat*. 2(1), 206–213.
- R., T. W. (2009). Kemiskinan Dan Bagaimana Memerangnya. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(7), 946–949.
- Rabbani, M. N. (2023). *Memecah Pelik Lingkaran Kemiskinan Lewat Pendidikan*. Universitas Airlangga.
- Rambeli, N., Marikan, D. A. A., Podivinsky, J. M., Amiruddin, R., & Ismail, I. (2021). The dynamic impact of government expenditure in education on economic

- growth. *International Journal of Business and Society*, 22(3), 1487–1507.
- Rasyid, M. R. H., & Triani, M. (2024). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan, Pendidikan dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. *Media Riset Ekonomi Pembangunan (MedREP)*, 1(2), 163–171.
- Rosana, E. (2019). Kemiskinan Dalam Perspektif Struktural Fungsional. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 14(1), 19–34.
- Samloy, R. (2013). *Anomali Demokrasi, Krisis Pemerintahan dan Bencana Alam Maluku*. Tribun Maluku.
- Sánchez Dávila, E. (2023). The impact of economic growth and social expenditure on poverty reduction. Panel VAR analysis for some Latin American countries, 2000–2019. *Investigación Económica*, 82(324), 51–71.
- Santoso, D. (2020). *Atasi Kesenjangan Kesehatan*. Kompas, Id.
- Santoso, S. (2019). *Mahir statistik parametrik*. Elex Media Komputindo.
- Sen, A. (1982). *Poverty and famines: an essay on entitlement and deprivation*. Oxford university press.
- Sijapati, B. (2006). Book Review: Measuring empowerment: cross-disciplinary perspectives. *Progress in Development Studies*, 6(4), 363–365.
- Sirait, J. F., Ferayanti, F., & Qudraty, M. F. (2022). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Perlindungan Sosial dan Kesehatan terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 7(4), 235–244.
- Sugiyono, P. (2011). Metodologi penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. *Alfabeta, Bandung*, 62, 70.
- Suharto, E. (2009). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat*.
- Suharto, E. (2015). Peran Perlindungan Sosial Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Indonesia: Studi Kasus Program Keluarga Harapan. *Sosiohumaniora*, 17.
- Suparno, H. (2015). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan Dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Peningkatan Pembangunan Manusia Di Provinsi Kalimantan Timur. *Journal of Innovation in Business and Economics*, 5(1), 1.
- Susanti, E. N., & Sartiyah. (2019). Determinants of Poverty In The Riau Islands Province. *Dimensi*, 8(2), 249–265.
- Suyanto, B. (2001). Kemiskinan Dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 14(4), 25–42.
- Taher, S., & Tuasela, A. (2019). Analisis Pengaruh Belanja Daerah Terhadap

- Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Mimika. *JURNAL KRITIS (Kebijakan, Riset, Dan Inovasi)*, 3(2), 40–58.
- The World Bank. (2024). *Poverty, Prosperity, and Planet Report*. World Bank.
- Todaro, M. P., & Smith, S. (2011). *Pembangunan Ekonomi Jilid 1*.
- Tusianti, E., Tiodo, D., & Siagian, H. (2023). Tingkat Akurasi Penerima Program Perlindungan Sosial Pada Rumah Tangga Pertanian di Indonesia (Accuracy Rate of Social Protection Program Beneficiaries in Agriculture Households in Indonesia). *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik DPR RI*, 14(2), 137–150.
- Wahyudi. (2020). Pengeluaran Pemerintah Dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tanjungpura*, 103.
- Wibisono, D. (2005). Metode penelitian & analisis data. *Jakarta: Salemba Medika*.
- Wibowo, T. (2016). Ketimpangan Pendapatan dan Middle Income Trap Income Inequality and Middle Income Trap. *Kajian Ekonomi Keuangan*, 20(2), 112–132.
- Widarjono, A. (2018). Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Disertai. *Panduan Eviews. Edisi Kelima. Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta*.
- Wooldridge, J. M. (2016). *Introductory Econometrics: A Modern Approach 6rd ed*. Cengage learning.
- World, B. (2023). *Social Protection Expenditure indicators*. World Bank Group.
- Yani, T. (2024). *Tingkat Kemiskinan di Indonesia dan Dunia: Tantangan dan Upaya Mengatasinya*. Media Indonesia.
- Yolanda, Y. (2019). Pengaruh korupsi, demokrasi dan politik terhadap kemiskinan di delapan negara asean dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(3), 845–854.
- Zulin, A. R. (2024). *Akses Kesehatan untuk Masyarakat miskin: Solusi untuk Indi Sehat dan Adil*. Kumparan.Com.